

MANAJEMEN PENDIDIKAN

★ *Islam*

TEORI DAN PANDUAN KOMPREHENSIF

Penulis :

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

Mujahidah, S.Sos., M.Pd

Farhan Rezki Arifin, S.Si., M.Si

Dr. Mulyana Abdullah, M.Pd.I

Muhammad Yasin, Lc., M.A

Nurhidaya M, S.Pd.I., M.Pd.I

Rosmalina Kemala, S.Kom., M.Pd

Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd.I

Dr. Amirah, S.Ag., M.Si

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

(Teori dan Panduan Komprehensif)

Penulis :

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
Mujahidah, S.Sos., M.Pd
Farhan Rezki Arifin, S.Si., M.Si
Dr. Mulyana Abdullah, M.Pd.I
Muhammad Yasin, Lc., M.A
Nurhidaya M, S.Pd.I., M.Pd.I
Rosmalina Kemala, S.Kom., M.Pd
Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd.I
Dr. Amirah, S.Ag., M.Si

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

(Teori dan Panduan Komprehensif)

Penulis :

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA
Mujahidah, S.Sos., M.Pd
Farhan Rezki Arifin, S.Si., M.Si
Dr. Mulyana Abdullah, M.Pd.I
Muhammad Yasin, Lc., M.A
Nurhidaya M, S.Pd.I., M.Pd.I
Rosmalina Kemala, S.Kom., M.Pd
Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd.I
Dr. Amirah, S.Ag., M.Si

ISBN : 978-623-8417-40-7

Editor:

Erfina Rianty

Penyunting :

Nurrohmi Gita Permata

Desain sampul dan Tata Letak:

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Oktober 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa melimpahkan berkah serta petunjuk-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, insan mulia yang menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah tim penulis dapat menyelesaikan buku ini berjudul "*MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM : Teori dan Panduan Komprehensif*". Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Pendidikan adalah mata rantai kunci dalam membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Di tengah perubahan yang begitu cepat dalam dunia pendidikan, perlu adanya pemahaman yang kuat tentang manajemen pendidikan Islam. Buku ini ditujukan untuk para pendidik, pengelola pendidikan, dan semua pihak yang peduli terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam.

Buku ini sebagai sumber penting yang menggambarkan konsep-konsep dasar dan praktik terkait manajemen pendidikan dalam konteks Islam. Buku ini membahas esensi manajemen pendidikan Islam, mencakup nilai-nilai, prinsip, dan etika yang menjadi landasan pendidikan Islam. Para pembaca akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab yang terlibat dalam pendidikan Islam, baik dari perspektif guru, siswa, orang tua, maupun administrator sekolah.

Fungsi-fungsi manajemen pendidikan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian,

juga dijelaskan secara rinci. Buku ini mengangkat pentingnya memandang sekolah atau madrasah sebagai sistem yang kompleks dan bagaimana manajemen yang efektif dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan fokus pada manajemen peserta didik, kurikulum pendidikan Islam, manajemen pembiayaan, mutu sekolah/madrasah, dan kepemimpinan dalam konteks pendidikan Islam, buku ini memberikan panduan komprehensif bagi para praktisi pendidikan Islam untuk mengoptimalkan lembaga mereka. Buku ini adalah sumber yang tak ternilai bagi siapa pun yang ingin memahami dan meningkatkan manajemen pendidikan Islam.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Akhirnya, kami berharap agar buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu para pembaca dalam memahami, mengelola, dan meningkatkan pendidikan Islam.

Makassar, Oktober 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAGIAN 1 KONSEP DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	1
A. PENGERTIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2
B. SUMBER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	6
C. TUJUAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	8
D. FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM.....	10
E. KESIMPULAN.....	16
BAGIAN 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN.....	18
A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN TAUHID	18
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN AKHLAK.....	19
C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN FISIK	23
D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN AKAL	24
E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN PSIKIS	26
F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN SOSIAL	27
G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN SEKSUAL	28
BAGIAN 3 FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN	30
A. PERENCANAAN (PLANNING).....	30
B. PENGORGANISASIAN (ORGANIZING).....	33
C. PENGARAHAN (DIRECTING).....	37
D. PELAKSANAAN (ACTUATING).....	38
E. PENGAWASAN (CONTROLLING)	41

BAGIAN 4 SEKOLAH/MADRASAH SEBAGAI SUATU SISTEM	44
A. PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	44
B. SEKOLAH SEBAGAI SISTEM	50
C. MADRASAH SEBAGAI INSTITUSI PENDIDIKAN	54
BAGIAN 5 MANAJEMEN PESERTA DIDIK.....	59
A. PENGERTIAN MANAJEMEN PESERTA DIDIK.....	59
B. TUJUAN MANAJEMEN PSERTA DIDIK	61
C. PRINSIP MANAJEMEN PSERTA DIDIK.....	62
D. FUNGSI MANAJEMEN PSERTA DIDIK	63
E. RUANG LINGKUP MANAJEMEN PSERTA DIDIK	64
F. LAYANAN KHUSUS YANG MENUNJANG MANAJEMEN PESERTA DIDIK	71
BAGIAN 6 KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM	74
A. PENGERTIAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM.....	74
B. FUNGSI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM	75
C. KARAKTERISTIK KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM	77
D. PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM	78
BAGIAN 7 MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM	85
A. KONSEP DAN DEFINISI MANAJEMEN PEMBIAYAAN.....	85
B. PRINSIP – PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN	87
C. TUJUAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN	90
D. SUMBER – SUMBER PEMBIAYAAN	91
E. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.....	93
F. PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN	95
G. STUDI KASUS SUKSES.....	96

H. KESIMPULAN.....	98
BAGIAN 8 MUTU SEKOLAH/MADRASAH	100
A. PENGERTIAN MUTU PENDIDIKAN	100
B. DASAR DAN PRINSIP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.....	105
C. PENERAPAN PENJAMINAN MUTU DI SEKOLAH/ MADRASAH ..	109
BAGIAN 9 KEPEMIMPINAN DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN ISLAM.....	113
A. PENGERTIAN KEPEMIMPINAN DAN PENDIDIKAN ISLAM	113
B. KEPEMIMPINAN DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN ISLAM.....	115
C. DASAR DAN KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN DALAM PERSFEKTIF PENDIDIKAN ISLAM	117
DAFTAR PUSTAKA	125
TENTANG PENULIS	134

BAGIAN 1

KONSEP DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat dan menjaga identitas agama dan budaya umat Muslim. Melalui pendidikan Islam, generasi muda Muslim dapat memahami ajaran-ajaran agama mereka, memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang Islam, dan menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, serta siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan Islam menjadi kunci utama dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan Islam yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Konsep dasar manajemen pendidikan Islam adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi semua aspek pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, moral, dan pedagogis. Konsep ini memadukan prinsip-prinsip manajemen umum dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam.

Manajemen pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam lingkungan pendidikan yang dikelola dengan baik, peserta didik dapat memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kasih sayang.

Melalui manajemen pendidikan Islam yang baik, peserta didik dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Mereka dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan pribadi, profesional, dan sosial.

A. PENGERTIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

1. Defenisi 'Manajemen' Menurut Pakar

Manajemen adalah suatu disiplin ilmu dan seni yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya (seperti manusia, uang, materi, dan waktu) dengan tujuan mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Definisi ini mencakup berbagai aspek dan prinsip yang membentuk landasan manajemen modern.

Peter Drucker, seorang pakar manajemen, menggambarkan manajemen sebagai suatu tindakan yang kreatif, yang melibatkan penggunaan pengetahuan dan keterampilan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Menurutnya, manajemen melibatkan pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Di Indonesia, para pakar manajemen juga memberikan kontribusi penting dalam mendefinisikan makna manajemen. Sebagai contoh, Djisman Simandjuntak, seorang pakar manajemen Indonesia, mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dalam

mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Menurutnya, manajemen juga berkaitan erat dengan seni berkomunikasi dan mengambil keputusan yang bijaksana.

Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka Aminuddin Surjakusuma menekankan pentingnya manajemen pendidikan yang berbasis kearifan lokal dan kearifan budaya Indonesia. Menurutnya, manajemen pendidikan harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.

Meskipun definisi-definisi di atas memiliki perbedaan dalam penekanannya, namun semua mencerminkan kompleksitas dan keberagaman aspek-aspek yang terlibat dalam praktik manajemen. Manajemen merupakan suatu keterampilan yang terus berkembang dan memerlukan pengetahuan, wawasan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis.

2. Defenisi 'Pendidikan Islam'

Pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "didik", awalan "pe" dan akhiran "an" mengandung arti "perbuatan". Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogie* yang berarti; bimbingan kepada anak. istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional, mendefinisikan pendidikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut dengan *tarbiyah* yang diambil dari kata dasar *Rabba-Yarubbu-Tarbiyah* yang maknanya; tumbuh dan berkembang atau bertambah, yaitu upaya menumbuhkembangkan atau menambah (menghidupkan) potensi manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Is'ra ayat 24.

Ditinjau dari segi terminologi, banyak batasan dan pandangan yang dikemukakan para ahli. Diantaranya ada yang mengemukakan pengertian pendidikan Islam sebagai berikut:

- a. Haidar P. Daulay menyebutkan Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk

pribadi Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.

- b. Ahmad Tafsir mendefenisikan Pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar peserta didik berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Menurut Zuhairini, Pendidikan Agama Islam berarti "usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam, nilai-nilai moral serta etika Islam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk individu Muslim yang beriman, bertaqwa kepada Allah, memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, dan mampu mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian manajemen Pendidikan Islam adalah suatu pendekatan sistematis yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai aspek pendidikan Islam. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen umum, namun diadaptasi dan diterapkan khusus dalam konteks pendidikan berbasis Islam.

Dalam konteks manajemen Pendidikan Islam, pendekatan ini membantu melahirkan generasi muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif pada masyarakat, sejalan dengan

ajaran Islam. Manajemen Pendidikan Islam juga melibatkan integrasi nilai-nilai agama, etika, dan moralitas Islam dalam setiap aspek proses pendidikan. Hal ini termasuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan karakter Islami pada peserta didik pada semua jenjang pendidikan.

B. SUMBER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Secara garis besar, sumber manajemen pendidikan Islam ada tiga yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah serta ijmak ulama.

1. Al-Qur'an

Banyak Ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa menjadi dasar tentang manajemen pendidikan Islam. Ayat-ayat tersebut bisa dipahami setelah diadakan penelaahan secara mendalam. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar manajemen pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: *Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk*

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
(QS. At-Taubah; 122)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menegaskan pentingnya manajemen, termasuk manajemen pendidikan Islam.

2. Sunnah

Rasulullah saw adalah seorang pendidik dan beliau juga memberi perhatian tinggi terhadap pendidikan. Rasulullah saw bersabda:

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُجِبًّا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَنَهَكَ (رواه البيهقي)

Artinya: *Jadilah engkau orang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka”* (HR. Baihaqi).

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah saw dengan jelas memotivasi umatnya agar berkiprah dalam pendidikan dan pengajaran. Di samping itu, beliau juga punya perhatian terhadap manajemen, antara lain dalam sabda berikut: Sesungguhnya Allah swt sangat mencintai orang yang jika

melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *itqan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas). (HR. Thabrani)

3. Ijmak Ulama

Ijmak (Konsensus) adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini, jika merujuk pada ayat dan hadis yang memerintahkan untuk menuntut ilmu (berpendidikan) serta keutamaan berjama'ah dalam melakukan suatu pekerjaan maka dapat disimpulkan bahwa para ulama pun sepakat Pendidikan Islam perlu dilakukan dengan manajemen yang baik agar tujuan Pendidikan dapat tercapai.

Sahabat Rasulullah saw, yaitu Ali bin Abi Thalib, r.a mengatakan: Perkara *batil* (keburukan) yang terorganisir dengan baik bisa mengalahkan *haq* (kebenaran) yang tidak terorganisir dengan baik.

C. TUJUAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan dalam rangka pengembangan pendidikan. Dalam arti ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Bisa juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengendalian sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.

Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktifitas pendidikan pada umumnya, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Sehingga aspek manager dan leader yang Islami atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam dan/atau yang berciri khas Islam, harus melekat pada manajemen pendidikan Islam.

Menurut Susilo Martoyo, tujuan manajemen pendidikan Islam adalah agar segenap sumber, peralatan ataupun sarana yang ada dalam suatu organisasi tersebut dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan sampai tingkat seminimal mungkin segenap pemborosan waktu, tenaga, materil, dan uang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan manajemen pendidikan Islam adalah menggunakan dan mengelola sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, pengembangan, kemajuan dan kualitas proses dan hasil pendidikan Islam.

Secara sistem organisasi, prinsip efisiensi dan ekonomis dalam menjalankan setiap kegiatan adalah hal yang sangat dibutuhkan. Dengan kata lain tingkat pemborosan atau penyalahgunaan sangatlah bertolak belakang dengan prinsip-prinsip organisasi yang

baik. Mengingat manajemen sebenarnya adalah alat dari suatu organisasi, maka ia tentunya harus memiliki tujuan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen pendidikan Islam adalah segala hal dan proses-proses yang berlangsung dapat benar-benar dikelola dengan baik sehingga proses pendidikan dapat terwujud sesuai ajaran Islam yang diharapkan.

D. FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Pada dasarnya, fungsi manajemen pendidikan Islam adalah bagian dari fungsi manajemen pada umumnya seperti merancang, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasi, dan mengendalikan. Untuk mempermudah pembahasan mengenai fungsi manajemen pendidikan Islam, maka akan dijelaskan fungsi manajemen pendidikan Islam yang meliputi: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan evaluasi.

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam pendidikan Islam perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para pengelola pendidikan Islam. Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan,

kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Allah memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam Al Qur'an Surat Al Hasyr: 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al Hasyr:18)

Ketika menyusun sebuah perencanaan dalam pendidikan Islam tidaklah dilakukan hanya untuk mencapai tujuan dunia semata, tapi harus jauh lebih dari itu melampaui batas-batas target kehidupan duniawi yakni sampai akhirat, sehingga kedua-duanya bisa dicapai secara seimbang.

Perencanaan dalam Manajemen pendidikan Islam meliputi:

- a. Penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif, prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen

yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat dan bahkan peserta didik.

- b. Penetapan tujuan sebagai garis pengarah dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan
- c. Formulasi prosedur sebagai tahap-tahap rencana tindakan.
- d. Penyerahan tanggung jawab kepada individu dan kelompok-kelompok kerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Manajemen Pendidikan Islam perencanaan merupakan kunci utama untuk menentukan aktivitas berikutnya. Tanpa perencanaan yang matang aktivitas lainnya tidak akan berjalan dengan baik bahkan mungkin akan gagal. Maka perencanaan yang matang adalah Langkah awal mendapatkan kesuksesan dalam manajemen.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja.

Pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual,

kelompok, maupun kelembagaan. Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika semua prinsip ini dapat diaplikasikan dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam.

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluhlantakan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.

3. Fungsi Pengarahan (*directing*)

Pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam fungsi pengarahan terdapat empat komponen, yaitu pengarah, objek pengarahan, materi pengarahan, dan metode pengarahan. Pengarah adalah orang yang memberikan pengarahan berupa perintah, larangan, dan bimbingan. Objek

pengarahan adalah orang yang diberi arahan agar merealisasikan pengarahan. Materi pengarahan adalah sesuatu yang disampaikan pengarah baik berupa perintah, larangan, maupun bimbingan. Sedangkan metode pengarahan adalah sistem komunikasi antara pengarah dan yang diberi pengarahan.

Dalam manajemen pendidikan Islam, agar substansi pengarahan yang diberikan kepada orang yang diberi pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik maka seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu: Keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Isi pengarahan hendaknya tidak memberatkan dan diluar kemampuan si penerima arahan, sebab jika hal itu terjadi maka sulit berharap isi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana diharapkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengarahan dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang didasari prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja, sehingga yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan ikhlas dalam bekerja.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang

tidak benar, mengoreksi yang salah atau membenarkan yang hak. Dalam pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik yang bersifat materil maupun spirituil.

Menurut Ramayulis, pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, yakni pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.

5. Fungsi Evaluasi (*Evaluating*)

Evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan kualitas dari proses pembelajaran dan pengajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam.

Melalui evaluasi memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk mengukur sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan Islam telah tercapai. Dengan mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan,

lembaga dapat mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Selain itu, evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kelemahan siswa dalam belajar. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan ini, lembaga pendidikan dapat menyediakan bantuan tambahan atau program remediasi untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar mereka.

Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan staf, dan alokasi sumber daya. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi memiliki landasan yang kuat dan dapat meningkatkan efektivitas lembaga pendidikan.

E. KESIMPULAN

Konsep dasar manajemen pendidikan Islam adalah kerangka konseptual untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi semua aspek pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, moral, dan pedagogis.

Manajemen pendidikan Islam bertujuan untuk menggunakan dan mengelola sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien

untuk mencapai tujuan, pengembangan, kemajuan dan kualitas proses dan hasil pendidikan Islam itu sendiri.

Fungsi manajemen pendidikan Islam, meliputi: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pengawasan (*controlling*) dan evaluasi (*evaluating*).

BAGIAN 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN TAUHID

Tugas dan tanggung jawab pendidikan tauhid adalah menanamkan tauhid sebagai dasar dan pokok keimanan pada seseorang. Dengan demikian dia tidak akan terjatuh ke dalam penyimpangan dan dosa kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Beberapa cara pendidikan tauhid sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, yakni:

1. Mengenalkan tentang islam, keutamaan dan ajarannya.
2. Menanamkan kalimat La Ilaha Illallah dan memperingatkan dari kesyirikan dan bentuk-bentuknya.
3. Memperdalam pengetahuan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namaNya, sifat-sifatNya, rububiyahNya dan uluhiyahNya.
4. Mengenalkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara mempelajari sirah Nabi, bukti-bukti kenabian, kemuliaan nasab, akhlak dan sunnah-sunnahnya.
5. Mengenalkan tentang hukum halal dan haram serta menjauhi hal-hal syubhat.
6. Memerintahkan anak ketika usia tujuh tahun untuk shalat dan memberinya hukuman jika tidak dikerjakan pada usia sepuluh tahun.

7. Mengajarkan anak untuk cinta kepada Rasul, keluarga dan para sahabatnya.
8. Membimbing dan membiasakan membaca al-Qur'an dengan tartil dan tajwid yang benar.
9. Merenungkan makna dan tafsir kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan syarah Hadits Nabi.
10. Mengamalkan ibadah-ibadah fardhu kemudian memperbanyak ibadah-ibadah sunnah.
11. Banyak berdzikir seperti merutinkan dzikir setelah shalat fardhu, dzikir pagi dan petang.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN AKHLAK

Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi dan karakter murid agar mereka memiliki akhlakul karimah. Dengan akhlak mulia, dia tidak akan melakukan kerusakan terhadap Tuhannya, orang lain ataupun lingkungannya.

Maksud dari pendidikan akhlak adalah pendidikan tentang sikap, moral, dan perilaku yang harus senantiasa diajarkan dan ditanamkan pada anak agar anak menjadi baik, terbiasa dengan kebaikan tersebut dan mampu mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari.

Maka, tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang berakhlak mulia akan menjadi lebih religius, istiqamah dalam ibadah, dan menghormati sesama dan makhluk Allah yang lainnya. Akhlak yang mulia adalah tiang dalam pendidikan Islam dan juga menjadi misi

dari kerasulan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya “*Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.*” (HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad No. 273)

Akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Akhlak melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Akhlak terkadang merupakan watak dasar seseorang atau diperoleh melalui latihan dan kebiasaan.

Pembinaan akhlak merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri atau bersama dalam rangka mengembangkan akhlak para anak didik agar mereka mempunyai akhlak yang mulia. Sehingga akan terbiasa dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sinilah perlunya peran pendidik, tokoh agama, dan lembaga pendidikan yang dapat mengambil peran terdepan di masyarakat dalam pembinaan akhlak anak tersebut, sehingga pada akhirnya mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Akhlak adalah alat kontrol sosial agar tercipta suasana rukun, tenteram, dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Keberhasilan pendidikan Islam akan terlihat pada akhlak peserta didiknya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah uswatun hasanah yang wajib menjadi contoh dan diteladani setiap muslim, karena beliau memiliki akhlak yang sangat agung dan mulia sebagaimana telah dinyatakan di dalam al-Qur’an:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

Artinya “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*” (QS. al-Ahzab:21)

Di antara akhlak yang beliau shallallahu ‘alaihi wasallam ajarkan adalah:

1. Jujur

Jujur bermakna kesesuaian antara berita dengan kenyataan yang ada dan sebaliknya jika tidak sesuai disebut dusta. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang yang akan mendatangkan keberkahan dan ketenangan dalam hidup serta kepercayaan orang lain kepada kita.

2. Menepati Janji

Menepati janji merupakan sifat terpuji dan mengingkarinya merupakan sifat tercela. Dengan menepati janji, kita terhindar dari sifat munafik. Dan juga kita akan terbebas dari tuntutan

baik dunia maupun di akhirat. Ukhuwah islamiyah akan semakin erat termasuk hubungan silaturahmi antar kerabat.

3. Amanah

Amanah adalah sebuah perintah yang dengannya seseorang terbebani untuk menunaikannya atau ia dipercaya dengannya. Sehingga amanah ini mencakup seluruh hak-hak Allah atas seseorang, seperti perintah-perintahNya yang wajib. Juga meliputi hak-hak orang lain, seperti barang-barang titipan (yang harus ditunaikan dan disampaikan kepada si pemiliknya) atau informasi yang sifatnya rahasia dan dilarang untuk disebarakan.

4. Malu

Malu adalah perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang buruk dan mencegah dari melalaikan hak orang lain. Malu adalah akhlak para Nabi, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Malu dalam Islam bagian dari iman. Orang yang punya rasa malu menandakan orang itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa malu akan membuahkan iffah, sehingga ia bisa mengendalikan diri dari perbuatan buruk yang berarti menjaga kesucian dan kehormatan dirinya.

5. Kasih Sayang

Kasih sayang adalah sikap saling mengasihi dan menghormati semua ciptaan Allah. Di antara bentuk kasih sayang adalah

berlemah lembut dalam ucapan dan perbuatan, menjenguk saudara yang sedang sakit, menghibur teman yang sedang sedih, peduli terhadap mereka yang ditimpa musibah. Termasuk kasih sayang dan perhatian kepada anak yang akan membuat anak merasa dicintai dan dihargai, juga membantu anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki emosi yang seimbang, serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN FISIK

Islam sangat perhatian terhadap pendidikan fisik pada anak, karena fisik yang sehat akan menunjang seseorang dalam beribadah, bekerja, bermuamalah dan berinteraksi dengan orang lain.

Berkaitan dengan pendidikan fisik, Islam mengajarkan beberapa metode praktis agar anak tumbuh dengan baik sesuai harapan, diantaranya:

1. Memberi nafkah yang halal secara zat dan cara mendapatkannya pada anak dan istri.
2. Memakan makanan dan minuman yang bergizi dan sehat, serta tidur yang cukup dan teratur.
3. Menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal.
4. Menghindarkan diri dari penyakit yang menular.
5. Memberi obat, vitamin, dan suplemen makanan bila sedang sakit.

6. Mengajak anak untuk berolah raga, dua atau tiga kali sepekan.
7. Membiasakan anak untuk qana'ah (merasa cukup) dan zuhud (tidak terpengaruh dengan kemewahan dan kenikmatan dunia).
8. Membiasakan anak untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh agar tidak menyimpang dan menjadi pengangguran.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN AKAL

Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan akal kepada seluruh manusia yang merupakan kelebihan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Allah meninggikan derajat orang-orang yang menggunakan akalnya untuk menuntut ilmu. Pendidikan akal adalah pembentukan pola pikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, seperti ilmu syar'i, teknologi, sains, kebudayaan, dan peradaban. Dengan demikian pemikiran anak menjadi matang dan bermuatan ilmu sehingga mampu mengkaji, memahami, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah. Tugas dan tanggung jawab pendidikan akal adalah:

1. Menggunakan akal untuk mempelajari ilmu agama dan tidak mempertentangkannya dengan logika.
2. Menumbuh kembangkan potensi akal secara maksimal sesuai dengan kadar ilmu dan pengetahuannya.
3. Menggunakan akal dalam mengajar dan mendidik anak.
4. Menggunakan akal untuk tadabbur dan tafakkur terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

5. Menundukkan akal terhadap hukum syari'at dan menerima segala tujuan dan maksud pensyari'atan dalam islam.

Pendidikan anak harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan otak. Ada beberapa cara orang tua dalam melakukan pendidikan akal (intelektual) pada anak, yakni:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana belajar seperti kursi dan meja belajar, buku dan alat tulis dan sebagainya.
2. Merangsang keinginan belajar anak di rumah seperti belajar sambil bermain, tanya jawab dan sebagainya.
3. Membiasakan anak untuk berfikir logis dalam menyelesaikan setiap masalah yang ia hadapi dan memberi contoh yang baik dan benar.
4. Melatih anak mengaitkan sebab-akibat, hal-hal yang harus dilakukan sebagai pendahuluan, inti, sampai pada kesimpulan.
5. Mengajarkan anak untuk berfikir adil dan obyektif, bijak dalam memutuskan perkara, dan berani jujur sesuai kenyataan yang terjadi.

Setelah anak masuk ke lembaga pendidikan (sekolah ataupun pesantren), maka tanggung jawab orangtua dalam pendidikan akal (intelektual) bertambah banyak seperti: menyiapkan suasana belajar yang kondusif, mengulang (muraja'ah) pelajaran, mengerjakan latihan dan tugas, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah anak agar anak tidak putus sekolah.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN PSIKIS

Psikis atau qalbu merupakan sesuatu yang amat esensial terhadap kondisi jiwa seseorang. Qalbu mempunyai sifat atau tabiat yang tidak tetap (inkonsisten). Ia selalu berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Untuk itu qalbu harus dididik dengan baik supaya tidak melenceng dari fitrah-Nya atau tidak sakit bahkan mati.

Pendidikan qalbu dimaksudkan di sini adalah mendidik anak supaya memiliki hati yang bersih dan bebas dari segala penyakit hati seperti riya, sum'ah, ujub, hasad, dengki, dendam, dan sebagainya.

Tujuan dari pendidikan qalbu ini diantaranya mendekatkan hati dengan ritualitas agama, membentuk kepribadian dan karakter anak, mempertautkan hati dengan kehidupan akherat agar tidak larut dengan dunia. Di dalam pendidikan kalbu ini, ada dua aspek yang diperhatikan, yakni qalbu yang bersifat jasmani dan qalbu yang bersifat ruhani.

Pendidikan qalbu sangat penting dilakukan oleh setiap individu yang ingin selamat dari godaan setan (dari kalangan jin dan manusia) serta nafsu dalam dirinya. Pendidikan qalbu bersumber pada bimbingan dan petunjuk al-Qur'an dan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sejarah membuktikan bahwa keduanya memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam penyucian jiwa (tazkitatun nafs) dan memperbaiki hati (ishlahul-qalb).

Tugas dan tanggung jawab pendidikan qalbu di antaranya:

1. Memelihara hati agar selamat dari hal-hal yang dapat memalingkannya dari jalan yang lurus.
2. Agar hati selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan.
3. Menjaga hati dari hal-hal yang dapat mengotorinya.
4. Baiknya hati akan nampak pada ucapan, sikap dan perbuatan.

F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN SOSIAL

Pendidikan sosial yang dimaksudkan adalah membiasakan anak sejak usia dini untuk melaksanakan adab-adab berinteraksi dengan manusia yang didasarkan pada hati yang ikhlas dan ajaran Islam yang mulia agar tertanam keimanan dengan kuat, toleransi, dan penjagaan ukhuwah sehingga dalam bermasyarakat nantinya tercipta keamanan dan ketentraman dalam beribadah dan bersosialisasi satu sama lain.

Ada beberapa upaya-upaya untuk mewujudkan pendidikan sosial atau masyarakat melalui pendekatan pendidikan Islam, yakni:

1. Memberikan keilmuan dan wawasan kemasyarakatan yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits tentang hablum minannas (hubungan dengan manusia) dan hablum minallah (hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala).
2. Memberikan contoh dan praktik pengamalan ayat al-Qur'an dan hadits yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial, seperti saling mengunjungi yang sakit, membantu yang

tertimpa musibah, tolong menolong dalam kebaikan, baik sangka satu sama lain, toleransi beragama, saling menasehati, mengucapkan salam, memelihara lingkungan tempat tinggal, mengatasi buta aksara dan buta al Qur'an, memberantas kemiskinan dan kriminalitas dan lain sebagainya.

3. Menanamkan dasar-dasar psikis yang mulia dengan menanamkan ketaqwaan kepada anak (peserta didik), persaudaraan antar sesama, mengajarkan kasih sayang, mengutamakan orang lain, memberi maaf kepada orang lain, dan mengajarkan keberanian untuk senantiasa berbuat benar.
4. Menjalankan kewajiban, melihara hak-hak kerabat ataupun orang lain seperti hak kedua orang tua, hak anak, hak saudara seiman, hak tetangga, hak guru, dan sebagainya.
5. Melaksanakan tata kesopanan sosial sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hal ini dapat diajarkan kepada anak (peserta didik) seperti dengan membiasakan adab memberi salam, adab meminta izin, adab di dalam majlis, adab berbicara, adab bergurau, adab makan dan minum, adab mengucapkan selamat, adab menjenguk orang sakit, adab berta'ziah, adab bersin dan menguap, dan sebagainya.

G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN SEKSUAL

Disebutkan di dalam al-Qur'an bahwa manusia diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala secara berpasangan laki-laki dan perempuan dan kepada mereka dianugerahi rasa ingin dicintai dan mencintai,

rasa kasih sayang, keinginan untuk memiliki satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah. Tercapainya kebutuhan cinta itu akan membuat manusia merasa tenang, tenang dan bahagia, begitu juga dengan sebaliknya. Atas dasar inilah, maka tanggung jawab pendidikan seks harus dimulai dari pendidikan keluarga. Sudah menjadi hak anak untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang seks agar tidak rusak karena pengaruh luar.

Tanggung jawab pendidikan seksual merupakan upaya untuk memberikan pemahaman, pengajaran dan penyadaran kepada anak tentang masalah seksual, naluri dan perkawinan. Pendidikan ini dilakukan berdasarkan tingkatan usia anak yaitu:

- a. Usia 7-10 tahun (masa tamyiz atau masa pra-pubertas). Pada usia ini, etika meminta izin dan memandang sesuatu diajarkan pada anak.
- b. Usia 10-14 tahun (masa murahaqah atau masa pubertas/peralihan). Pada usia ini berbagai macam yang dapat merangsang seksual harus dijauhkan dari anak.
- c. Usia 14-16 tahun (masa bulugh atau masa adolesen/remaja). Pada usia ini anak diberi pelajaran etika (adab) dalam hubungan seksual, apabila anak sudah siap untuk menikah.
- d. Usia setelah masa adolesen (remaja atau pemuda). Pada usia ini anak diajarkan menjaga kehormatan diri (*isti'faf*), apabila ia memang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan (Ulwan, 1993).

BAGIAN 3

FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN

Secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen pendidikan merupakan proses dari suatu aktivitas yang dilakukan dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan.

A. PERENCANAAN (PLANNING)

Perencanaan merupakan kegiatan menentukan tujuan dan merancang program-program yang terarah dan sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi.

Menurut ovalhanif, secara umum prinsip perencanaan adalah:

1. Apa yang akan dilakukan
2. Bagaimana mencapai hal tersebut
3. Siapa yang melakukan
4. Lokasi aktivitas
5. Kapan akan dilakukan dan berapa lama waktunya
6. Sumber daya yang dibutuhkan

Demikian halnya dalam pendidikan Islam, perencanaan harus benar-benar diperhatikan oleh para pengelola pendidikan Islam. Kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan Islam akan merusak

atau bahkan menghentikan proses pendidikan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan mengarahkan setiap orang yang beriman untuk membuat sebuah rencana apa yang akan dilakukan di kemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Hasyr : 18)

Niat ketika menyusun sebuah perencanaan dalam pendidikan Islam tidaklah dilakukan hanya untuk mencapai tujuan duniawi yang sifatnya fana, tapi harus lebih dari itu. Arahkanlah perencanaan itu untuk mencapai target kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Perencanaan dalam pendidikan islam harus menggunakan metode ilmiah yang komprehensif, pengetahuan nilai-nilai islam, dan pengamalan yang berkelanjutan.

Mahdi bin Ibrahim mengemukakan ada lima perkara penting untuk diperhatikan demi keberhasilan sebuah perencanaan, yaitu :

1. Ketelitian dan kejelasan dalam membentuk tujuan

2. Ketepatan waktu dengan tujuan yang hendak dicapai
3. Keterkaitan antara fase-fase operasional rencana dengan penanggung jawab operasional, agar mereka mengetahui fase-fase tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai
4. Perhatian terhadap aspek-aspek amaliah ditinjau dari sisi penerimaan masyarakat, mempertimbangkan perencanaan, kesesuaian perencanaan dengan tim yang bertanggung jawab terhadap operasionalnya atau dengan mitra kerjanya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dicapai, dan kesiapan perencanaan melakukan evaluasi secara terus menerus dalam merealisasikan tujuan.
5. Kemampuan organisatoris penanggung jawab operasional.

Sementara itu menurut Ramayulis, Perencanaan dalam Manajemen pendidikan Islam meliputi :

1. Penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif, prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat dan bahkan murid.
2. Penetapan tujuan sebagai garis pengarah dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan
3. Formulasi prosedur sebagai tahap-tahap rencana tindakan.
4. Penyerahan tanggung jawab kepada individu dan kelompok-kelompok kerja.

Dalam manajemen pendidikan islam, perencanaan menjadi penentu aktivitas berikutnya. Perencanaan pendidikan islam akan berjalan

tanpa kendala apabila memerhatikan langkah-langkah perencanaan, seperti menentukan tujuan, meneliti masalah, menentukan tahapan, merumuskan cara menyelesaikan masalah, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan berusaha melakukan perbaikan setelah melakukan evaluasi.

B. PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir. Pengorganisasian segala sumber daya untuk mengoptimalkan kemampuan masing-masing pribadi hingga terwujud kerja sama dalam mencapai tujuan melalui pelaksanaan rencana. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Maidah ayat 2 berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan.*” (QS. Al-Baqarah : 2).

Menurut Handoko pengorganisasian yaitu:

1. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi.
2. Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan untuk satu orang.

3. Pengadaan atau pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmoni.

Manusia perlu berorganisasi dengan beberapa tujuan, menurut Karta Sapoetra tujuan organisasi diantaranya:

1. Organizing yang efektif akan menyebabkan masing-masing anggota suatu organisasi mengetahui kelompok-kelompok aktivitas apa yang dilaksanakan.
2. Dengan organizing yang tepat, akan didapat ketegasan, kejelasan dalam hubungan-hubungan kerja dalam suatu organisasi.
3. Hubungan yang tetap dan diinginkan diantara aktivitas-aktivitas dan pelaksanaan akan tercapai, organisasi ini jauh lebih besar manfaatnya dari pada sekelompok usaha-usaha individual.
4. Organizing yang baik berarti juga pendelegasian wewenang dilakukan dengan mantap, sehingga mereka menerima limpahan wewenang yang dapat bertanggung jawab.

Ernest Dale dalam Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan memberikan pengorganisasian sebagai sebuah proses yang berlangkah jamak. Proses pengorganisasian tersebut sebagai berikut:

1. Perincian pekerjaan

Tahap pertama, yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pembagian kerja

Tahap kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau berkelompok. Di sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diserahi tugas harus didasarkan pada kualifikasi tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan.

3. Penyatuan pekerjaan

Tahap ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Pengelompokan tugas yang saling berkaitan jika organisasi sudah membesar atau kompleks. Penyatuan kerja ini biasanya disebut departementalisasi.

4. Koordinasi pekerjaan

Tahap keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Pada setiap orang dan setiap bagian melaksanakan pekerjaan atau aktivitas kemungkinan timbul konflik di antara anggota dan mekanisme pengkoordinasian memungkinkan setiap anggota organisasi untuk tetap bekerja efektif.

5. Monitoring dan Reorganisasi

Tahap kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram atau berkala untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.

Menurut Didin dan Hendri, Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan.

Sementara itu Ramayulis menyatakan bahwa pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan.

Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa pengorganisasian merupakan fase kedua setelah perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Organisasi menginformasikan struktur penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama sesuai kewajiban, hak, hubungan tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.

C. PENGARAHAN (DIRECTING)

Pengarahan (directing), yaitu kegiatan memberikan arahan agar seluruh tim dan sumber daya yang ada dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, menjalankan seluruh perencanaan yang telah dibuat agar dijalankan dengan baik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda, memiliki pandangan serta pola hidup yang pila. Oleh karena itu pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip mengarah pada tujuan pokok dari pengarahan.
2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan organisasi.
3. Prinsip kesatuan komando.

Di dalam fungsi pengarahan terdapat empat komponen, yaitu:

1. Pengarah, orang yang memberikan pengarahan berupa perintah, larangan, dan bimbingan.
2. Yang diberi pengarahan, orang yang diinginkan dapat merealisasikan pengarahan.

3. Isi pengarahan, sesuatu yang disampaikan pengarah baik berupa perintah, larangan, maupun bimbingan.
4. Metode pengarahan, sistem komunikasi antara pengarah dan yang diberi pengarahan.

Dalam manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan yang diberikan kepada orang yang diberi pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik maka seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu : Keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Isi pengarahan baik yang berupa perintah, larangan, maupun bimbingan hendaknya tidak memberatkan dan diluar kemampuan si penerima arahan, sebab jika hal itu terjadi maka jangan berharap isi pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh si penerima pengarahan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa fungsi pengarahan dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang didasari prinsip-prinsip agama kepada rekan kerja, sehingga orang tersebut ikhlas, serius, dan semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

D. PELAKSANAAN (ACTUATING)

Pelaksanaan/pengerakan (actuating) merupakan upaya untuk menggerakkan dan memotivasi seseorang mewujudkan rencana yang telah dibuat menjadi realisasi melalui berbagai tindakan, pengarahan, kerja sama secara optimal menggunakan potensi diri.

Menurut Andri dan Endang, Fungsi pokok actuating dalam manajemen adalah:

1. Mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi pengikut
2. Menaklukan gaya tolak seseorang
3. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik
4. Mendapatkan, memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas dan organisasi tempat mereka bekerja
5. Menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap Tuhannya, Negara dan masyarakat.

Prinsip-prinsip implementasi actuating antara lain:

1. Tadriji atau bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan elemen organisasi.
2. Modeling atau pemberian contoh, pemimpin harus bisa memberi contoh baik, bukan hanya bisa bicara tetapi juga mampu melaksanakan.
3. Keseimbangan yaitu keseimbangan antara kewajiban dan hak, antara reward bagi yang berprestasi dan punishment bagi yang melanggar aturan.
4. Kejelasan semua kegiatan harus ada rambu-rambu yang jelas untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas agar tidak ragu-ragu, sehingga membuat hati tenang dalam bekerja.

Menurut Munir dan Wahyu Ilaihi di dalam proses actuating ada beberapa langkah-langkah yaitu:

1. Pemberian Motivasi,

Salah satu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk memotivasi yang lain dalam mencapai tujuan atau misi organisasi. Kemampuan, keterampilan dan kecakapan karyawan sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan tetapi yang terpenting adalah keinginan dan kemauan untuk bekerja giat demi mencapai hasil yang optimal.

2. Pembimbingan,

Proses *actuating* atau penggerakan anggota untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dikoordinasikan pada setiap bidang dibutuhkan suatu arahan atau bimbingan. Hal dimaksudkan untuk membimbing para anggota yang terkait guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan.

3. Koordinasi,

Penjalinan hubungan atau koordinasi dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya harmonisasi di dalam suatu kegiatan. Dengan menjalin hubungan, dimana para pengurus atau anggota yang ditempatkan dalam berbagai bidang dihubungkan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan.

4. Komunikasi,

Komunikasi dibutuhkan untuk timbal balik antara pimpinan dengan para pelaksana kegiatan yang artinya kinerja komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Actuating pada lembaga pendidikan adalah tindakan untuk memulai, memotivasi, dan mengarahkan serta mempengaruhi para pekerja baik pendidik, tenaga kependidikan maupun karyawan untuk mengerjakan tugas-tugas di lembaga pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan.

Pimpinan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam actuating seperti pengambilan keputusan, penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain, melalui lisan atau tertulis, pemberian dukungan dan motivasi kerja.

E. PENGAWASAN (CONTROLLING)

Pengawasan dalam manajemen perlu dilakukan guna menilai, mengkaji, dan melaporkan, serta merekomendasikan temuan di lapangan. Pengawasan juga menjadi bagian dari fungsi kepemimpinan dalam sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi.

Pengawasan adalah upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan standar kriteria dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah, dan mempertahankan yang sudah benar.

Terdapat tiga jenis pengawasan yang perlu dipahami, yaitu:

1. *Feedforward control*, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung,
2. *Concurrent control*, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung, dan
3. *Feedback control*, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai.

Beberapa fungsi pengawasan dalam manajemen antara lain:

1. Untuk menilai apakah setiap unit organisasi sudah menjalani tanggung jawab sesuai aturan atau standar yang telah ditetapkan.
2. Untuk menilai apakah semua dokumen, surat, maupun laporan yang dibuat benar-benar mempresentasikan kegiatan yang dilakukan organisasi.
3. Untuk menilai apakah pengawasan dari pihak manajemen sudah memadai dan berjalan secara efektif.
4. Sebagai bahan atau data penelitian untuk menilai keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam pendidikan Islam, pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang kontinu dengan pendekatan islami untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas individu atau seluruh komponen dalam lembaga terkait guna mewujudkan lembaga yang berkompeten dan berkualitas.

Pengawasan Pendidikan lebih menitikberatkan pada pengembangan profesionalisme guru dan sistem pengawasan dilakukan oleh pengawas pendidik yang secara legal diberikan kewenangan untuk menangani masalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan layanan dan penyebaran informasi yang akurat. Pengawas di lembaga pendidikan bukan untuk mencari kesalahan sebagai dasar untuk memberi hukuman akan tetapi menjadi mitra pendidikan dalam membina dan mengembangkan mutu pendidikan sehingga secara bertahap kinerja lembaga pendidikan semakin meningkat menuju tercapainya sekolah yang efektif.

Jika para pengelola pendidikan Islam melaksanakan tugasnya dengan tepat sesuai dengan fungsi manajemen maka tidak akan ada lagi lembaga pendidikan Islam yang tertinggal, tidak terorganisir dengan rapi, dan tidak memiliki sistem kontrol yang sesuai.

BAGIAN 4 SEKOLAH/MADRASAH SEBAGAI SUATU SISTEM

A. PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pendidikan dipandang sebagai suatu proses untuk membina dan mengantarkan peserta didik agar dapat menemukan kemandiriannya, sehingga pendidikan menjadi suatu aktivitas pendewasaan diri seseorang. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menegaskan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Batasan tersebut menyiratkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses kegiatan untuk mentransformasikan nilai-nilai kepribadian dari segenap komponen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang memuat gambaran tentang sistem nilai, keluhuran, kebenaran, dan keindahan dalam kehidupan. Hal tersebut selaras dengan tujuan Pendidikan Nasional yang diarahkan pada berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sistem Pendidikan Nasional dibangun dalam kerangka dasar yang digali dari akar budaya dan falsafah bangsa dengan menitikberatkan pada persaingan global dalam peradaban bangsa dan dunia. Sehingga setiap individu bangsa Indonesia harus memiliki keahlian dan keterampilan yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Hal itu baru dapat terwujud apabila kualitas pendidikan yang diterapkan telah mampu mencapai tujuannya secara optimal. Relevansi kualitas pendidikan dengan kehidupan masyarakat secara global, merupakan persoalan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang menuntut perhatian dan penanganan serius dari seluruh komponen bangsa. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang diselenggarakan secara terencana, teratur, terarah, dan berkesinambungan.

Namun pada faktanya, sistem pendidikan di Indonesia hingga saat ini belum mampu menjawab tantangan kemajuan global di masa mendatang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus perhatian dalam pembangunan nasional masih menyisakan persoalan-persoalan besar yang harus dihadapi. Dunia pendidikan Indonesia masih harus berhadapan dengan berbagai masalah internal yang mendasar dan bersifat kompleks serta masih harus menghadapi sejumlah

problematika yang sifatnya berantai, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi (Habe & Ahiruddin, 2017).

Peningkatan kuantitas peserta didik dan lamanya mengenyam pendidikan formal belum diikuti dengan gambaran hasil pendidikan yang semestinya. Berdasarkan data yang disurvei oleh *World Top 20 Education Poll* pada tahun 2023 tampak bahwa pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-67 dari 203 negara dengan rata-rata masa peserta didik mengenyam pendidikan selama 12,9 tahun (World Top 20, 2023). Indikator pemeringkatan ini didasarkan pada tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini yang mencapai 68%, menyelesaikan (tamat) Sekolah Dasar (SD) mencapai 100%, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) mencapai 91,19%, lulus Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) mencapai 78%, dan tingkat kelulusan Perguruan Tinggi yang hanya mencapai 19%. Posisi ini masih berada jauh di bawah Vietnam (53), Brunei Darussalam (47), Singapura (22). Capaian prestasi ini secara langsung atau tidak, akan berdampak negatif terhadap kemajuan bangsa pada masa-masa yang akan datang apabila tidak sesegera mungkin dilakukan perbaikan dan pembenahan.

Secara normatif, pemerintah telah dan sedang berupaya untuk melakukan pembenahan dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia sebagai pelaksanaan dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanahkan pengembangan standar nasional pendidikan (pasal 35), penetapan kerangka dasar kurikulum (pasal 38), pembinaan dan pengembangan tenaga

pendidik dan kependidikan (pasal 41-44), serta pendanaan pendidikan (pasal 46-49). Namun, fakta menunjukkan realitas yang sebaliknya. Berbagai permasalahan internal seperti layanan pendidikan tanpa diskriminasi, ketersediaan dana untuk program wajib belajar, ketersediaan tenaga pendidik yang bermutu, pembinaan tenaga pendidik untuk sekolah dan di luar sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi hambatan utama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu.

Berkenaan dengan upaya mencerdaskan masyarakat, sistem pendidikan nasional saat ini dipandang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan bangsa. Hal ini akan membawa implikasi terhadap kemakmuran dan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Di samping itu, rancangan pendidikan nasional belum berhasil keluar dari kerangka politik etis sebagaimana pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda. Hal itu, menurut Yaumi (2017) dapat dicermati dari berbagai kebijakan yang cenderung diskriminatif, pendidikan yang berorientasi menghasilkan tenaga kerja murah, dan menciptakan lulusan yang mampu menjadi pegawai negara. Oleh karenanya, perlu adanya upaya reformasi sistem pendidikan, baik pada aspek internal seperti kualitas pendidikan yang diselenggarakan maupun pada aspek eksternal, yakni tuntutan perubahan global yang memerlukan penyesuaian sistem pendidikan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.

Upaya reformasi pendidikan ini harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pentingnya reformasi dalam pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas ini, menurut Iskandar (2021) perlu lebih ditekankan, karena berbagai indikator yang menunjukkan bahwa pendidikan yang ada belum mampu menghasilkan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri yang menjadi faktor utama penghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional.

Sumber daya manusia sering dipandang sebagai salah satu faktor produksi dalam usaha menghasilkan barang atau jasa oleh satuan-satuan ekonomi. Alasan lain adalah bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dalam tataran sosial-ekonomi. Dalam kaitan ini dapat dinyatakan secara kategorikal bahwa melihat manusia hanya sebagai salah satu alat produksi merupakan persepsi yang tidak tepat. Manusia di sini akan lebih tepat jika dipandang sebagai subjek yang berkepentingan. Oleh karenanya, sumber daya manusia harus diposisikan sebagai manusia yang hidupnya bergantung pada dan dipengaruhi oleh lingkungan, pihak yang berkepentingan (subjek), dan memerlukan sumber dari lingkungan, bahkan berhak diperlukan seadil-adilnya oleh lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini dapat berupa lingkungan fisik

alamiah, lingkungan sosial-ekonomi (masyarakat dan sistem perekonomian), serta lingkungan politik dan pemerintahan. Dalam lingkungan inilah sistem pendidikan dapat memainkan peran dan fungsinya untuk membentuk dan membina sumber daya manusia yang mampu menciptakan/melahirkan nilai-nilai baru sebagai buah dari kemampuan berpikir kritis serta tingkat keterampilan yang tinggi. Di sini pula lah pemerintah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat yang menjadi warganya bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, dan menerapkan suatu sistem pendidikan yang memadai selaras dengan tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakatnya.

Sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini terdiri atas tiga jalur pendidikan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1, yaitu jalur pendidikan formal (sekolah dan madrasah), jalur pendidikan nonformal (lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis), dan jalur pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri). Khusus untuk sistem pendidikan pada jalur pendidikan formal, pemerintah telah menetapkan lembaga yang menaungi dan mengatur penyelenggaraannya, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi lembaga pendidikan persekolahan dan Kementerian Agama yang menaungi lembaga pendidikan madrasah.

B. SEKOLAH SEBAGAI SISTEM

Sebagai alat pemberdayaan yang efektif, pendidikan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan transformasi ekonomi dan sosial. Pendidikan yang ingin diwujudkan Indonesia bertumpu pada pilar-pilar: *learning how to learn*, *learning how to know*, *learning how to be*, dan *learning how to live Together* (EFA, 2015). Pendidikan yang bertumpu pada empat pilar tersebut akan menjadikan masyarakat terpelajar menjadi masyarakat madani sebagai syarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Untuk mencapai empat pilar pendidikan tersebut, pemerintah melaksanakan program *Education for All* (EFA) yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia terpelajar melalui pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan literasi, kesetaraan gender dalam pendidikan, dan mutu pendidikan. Keenam layanan pendidikan ini ditargetkan untuk mewujudkan masyarakat bebas dan mandiri dalam mengenyam pendidikan, serta meningkatkan daya saing bangsa di dunia global. Di sinilah sistem pendidikan persekolahan di Indonesia menjadi ujung tombak keberhasilan pencapaian tujuan tersebut.

Meskipun wujudnya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, keberadaan sekolah merupakan salah satu indikasi terwujudnya masyarakat modern. Hal ini tidak terlepas dari jenjang

perkembangan masyarakat (jenjang Comte), yaitu (i) jenjang teologi, di mana manusia mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat adikodrati; (ii) Pencapaian manifestasi kemampuan manusia untuk menangkap fenomena lingkungan dengan bersandar pada kekuatan-kekuatan metafisik atau abstrak; dan (iii) Kemampuan manusia untuk menjelaskan gejala alam maupun sosial berdasarkan pada deskripsi ilmiah melalui pemahaman terhadap kekuasaan hukum objektif.

1. Sekolah sebagai Organisasi

Kata sekolah berasal dari bahasa latin, yakni *skhole*, *colae*, *skhoe* atau *colae* yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka, yakni bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja (Iskandar, 2021). Kegiatan yang dilakukan pada waktu luang ini di antaranya mempelajari cara berhitung, membaca huruf, dan mengenal tentang moral (budi pekerti), serta estetika (seni) yang didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai kegiatan tadi.

Seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan, konsep sekolah terus berubah dan berkembang yang pada saat ini dimaknai sebagai sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid dibawah pengawasan pendidik (guru). Sebagian besar

negara, menurut Iskandar (2021) memiliki sistem pendidikan formal, yang pada umumnya bersifat wajib dalam upaya menciptakan peserta didik agar mengalami kemajuan setelah melalui proses pembelajaran.

Sekolah sebagai organisasi merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, memiliki fungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsanya. Berkenaan dengan hal ini. Philip Robinson (Iskandar, 2021) menyebut sekolah sebagai unit sosial yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu, yang salah satunya adalah untuk memudahkan pengajaran sejumlah pengetahuan.

Pada era globalisasi sekarang ini dengan tingkat perubahan yang sangat pesat dan menimbulkan banyak ketidakpastian masa depan yang dilalui, menuntut setiap organisasi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi permasalahan tersebut. Berkaitan dengan lembaga pendidikan seperti sekolah, Hoy dan Miskle (Iskandar 2021) menyebutkan perlunya sekolah menjadi organisasi pembelajar, yakni organisasi yang mencari cara untuk menciptakan masa depan, menjadikan pembelajaran sebagai proses kreatif yang berkesinambungan bagi seluruh anggotanya, mengembangkan, beradaptasi, dan mentransformasikan dirinya dalam menjawab kebutuhan serta aspirasi orang-orang di dalam organisasi ataupun luar organisasi, baik secara individu maupun

kolektif untuk terus meningkatkan kapasitas mereka dalam berkarya sesuai dengan perannya dalam organisasi.

2. Sekolah sebagai Sistem Sosial

Sistem sosial dalam hal ini dimaknai sebagai himpunan dari berbagai subsistem yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi dan membentuk kehidupan bersama untuk mencapai tujuan tertentu (Abdullah, 2022). Dalam sistem sosial, berbagai aksi yang ada diorganisasikan menjadi peran-peran, dan peran-peran itu menjadi satuan-satuan yang lebih besar, yaitu institusi. Institusi disebut suatu kompleks keutuhan peran yang melembaga dan secara struktur penting dalam sistem sosial yang ada. Institusi yang dimaksudkan adalah kelembagaan peran dan fungsi dari tindakan yang menyatu dalam satuan sistem sosial.

Sebagai sistem sosial, lembaga pendidikan (sekolah) harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala hal. Dalam hal ini, menurut Oemar Hamalik (Abdullah, 2022) lembaga pendidikan secara umum memiliki dua karakter: pertama, melaksanakan peranan fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem; kedua, mengenali individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan diposisi kebutuhan.

Ditinjau dari fungsinya, sekolah memiliki fungsi: (i) Memanifestasikan pendidikan untuk membantu mengembangkan

potensi peserta didik demi pemenuhan kebutuhan hidupnya, melestarikan kebudayaan, merangsang partisipasi demokrasi, dan mengembangkan cara berfikir rasional; (ii) Fungsi laten lembaga pendidikan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan secara tersembunyi yakni menciptakan atau melahirkan kedewasaan anak didik. Sementara itu, ditinjau dari perannya, sekolah berperan sebagai alat pengembangan pribadi, pengembangan warga, pengembangan budaya, dan pengembangan bangsa.

Berkenaan dengan penyelenggaraan persekolahan di Indonesia sistem pendidikan yang diimplementasikan didasarkan pada sejumlah paradigma universal, yakni: (i) pembangunan manusia holistik, (ii) pembelajaran sepanjang hayat, (iii) pendidikan untuk semua, dan (iv) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat melahirkan pemahaman kritis terhadap lingkungan hidup (sosial dan alam) dan segala bentuk intervensi terhadap lingkungan hidup, termasuk pembangunan.

C. MADRASAH SEBAGAI INSTITUSI PENDIDIKAN

Seperti halnya sekolah, di Indonesia madrasah ditetapkan sebagai lembaga pendidikan formal, namun pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Agama (Permenag RI No. 60 Tahun 2015, pasal 1 ayat 2). Lembaga pendidikan ini dapat menyelenggarakan pendidikan umum atau pendidikan kejuruan dengan kekhasan Agama Islam.

Madrasah sesungguhnya merupakan lembaga pendidikan Islam yang berakar dari tradisi Islam sendiri sehingga tidak mungkin ditangani secara sekuler, tetapi pemerintah pun memahami bahwa umat Islam menuntut hak dan status yang lebih baik bagi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga kedudukan dan orientasinya sama dengan sekolah. Menurut Mansur Mahfud Junaedi (Basit & Mudlori, 2019), meskipun mempunyai tujuan khusus, pendidikan yang dilaksanakan di madrasah harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional dalam artian bahwa pendidikan pada madrasah harus dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional.

Sebenarnya madrasah dengan sekolah umum itu sama dimana kurikulum mata pelajaran umum yang digunakan di madrasah 100% sama dengan kurikulum yang diberikan pada sekolah-sekolah umum seperti SD/SMP/SMA. Namun, yang membedakan adalah madrasah memiliki “nilai plus” jika dibandingkan sekolah umum, yaitu madrasah memiliki kurikulum dari dari Kementerian Agama untuk materi-materi pelajaran agama Islam yang diaplikasikan secara terpisah-pisah atau secara penuh pada jam pelajaran yang meliputi qur’an-hadits, fiqih, aqidah akhlak, SKI, dan bahasa Arab. Sedangkan pada sekolah umum, materi Agama Islam relatif sedikit dibandingkan materi Agama Islam yang diberikan di madrasah.

Berkenaan dengan Pendidikan agama Islam baik di sekolah maupun madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan,

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terkait hal ini, madrasah memiliki ciri khas yang lebih dari hanya sekedar penyajian mata pelajaran agama Islam, tetapi yang lebih penting ialah perwujudan dari nilai-nilai keislaman di dalam totalitas kehidupan madrasah. Suasana lembaga madrasah yang melahirkan ciri khas tersebut, menurut Muzhoffar Akhwan (Basit & Mudlori, 2019) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) Perwujudan nilai-nilai keislaman di dalam keseluruhan kehidupan lembaga madrasah; (2) Kehidupan moral yang beraktualisasi, dan (3) Manajemen yang profesional, terbuka, dan berperan aktif dalam masyarakat.

Dasar pendidikan Islam yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah adalah al-qur'an, as-sunah, serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam al-qur'an, ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah saw. (QS.96:1-5) menyiratkan perlunya mengajarkan segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. kepada umat.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أقرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) yang

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1], (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS. Al-Alaq:1-5)

[1]Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.

Sementara itu, Rasulullah saw. diyakini oleh umat Islam sebagai juru didik terbaik sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Athiyah Al-Abrasyi menyatakan pada satu hari Rasulullah saw. keluar dari rumahnya dan beliau menyaksikan adanya dua pertemuan dalam pertemuan pertama, orang-orang yang berdo'a kepada Allah 'azza wajallah' mendekati diri kepada-Nya, dalam pertemuan kedua orang sedang memberikan pelajaran.

أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَسْأَلُونَ اللَّهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ أَمَّا هَؤُلَاءِ
فَيَعْلَمُونَ النَّاسَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

Mereka ini (pertemuan pertama) minta kepada Allah bila Tuhan menghendaki maka la akan memenuhi permintaan tersebut dan jika la menghendaki maka tidak akan dikabulkannya. Tetapi golongan kedua ini mereka mengajar manusia sedangkan saya sendiri di utus untuk juru didik (HR. Ibnu Majah).

Praktek ini membuktikan kepada kita suatu contoh terbaik betapa Rasulullah saw. mendorong orang belajar dan menyebarkan ilmu secara luas dan suatu pujian atas keutamaan juru didik.

Berkenaan dengan perkembangan madrasah sebagai institusi pendidikan di Indonesia, Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, maka strategi pengelolaan madrasah semakin mengalami kemajuan. Berdasarkan SKB tiga Menteri tersebut, pada madrasah telah terjadi fenomena baru, yaitu dimasukkannya mata pelajaran umum dengan prosentase yang cukup tinggi, yaitu 70 % di samping mata pelajaran agama Islam. Pada perkembangan selanjutnya, pembakuan kurikulum pendidikan antara sekolah dan madrasah terus dilakukan dengan tujuan tidak hanya untuk mensejajarkan antara sekolah umum dengan madrasah dalam penjenjangan dan mutu pendidikan, tetapi juga sebagai upaya penyeragaman dan pembakuan dalam struktur program dan kurikulum.

Madrasah diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam pembentukan intelektual, emosional dan spritual anak. Madrasah seharusnya menjadi wadah pemupukan kecerdasan setiap siswa, dan di atas segalanya menjamin agar setiap siswa mendapat kesempatan belajar yang sama dan layak.

BAGIAN 5 MANAJEMEN PESERTA DIDIK

A. PENGERTIAN MANAJEMEN PESERTA DIDIK

Manajemen Peserta Didik merupakan salah satu bidang operasional Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Adapun pengertiannya yaitu keseluruhan proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif dan efisien.

Manajemen peserta didik menurut Muhammad Rifa'i adalah perencanaan manajemen peserta didik yang meliputi (analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan peserta didik), pelaksanaan manajemen peserta didik yang meliputi (pembinaan peserta didik berupa layanan akademik, layanan non-akademik, pembinaan kedisiplinan peserta didik), evaluasi manajemen peserta didik meliputi (pencatatan dan pelaporan, kelulusan dan alumni).

Manajemen peserta didik merupakan salah satu bidang operasional Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan

efektif dan efisien. Oleh sebab itu, manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik tersebut dari suatu sekolah, melainkan aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

Manajemen peserta didik adalah pengelolaan kegiatan peserta didik yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan peserta didik di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau madrasah.

Manajemen peserta didik bertujuan mengatur kegiatan peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah atau madrasah untuk pencapaian tujuan sekolah atau madrasah dan tujuan pendidikan yang optimal. Manajemen peserta didik juga mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah atau madrasah hingga lulus. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan pembelajaran baik intra maupun ekstrakurikuler. Dengan itu bisa memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah serta tujuan pendidikan secara komprehensif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut setidaknya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yakni

meliputi penerimaan peserta didik baru, proses pengelolaan pembelajaran, serta pengembangan peserta didik.

Peserta didik merupakan bagian dalam sistem pendidikan, peserta didik adalah objek atau bahan mentah dalam proses transformasi pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, keberadaan sistem pendidikan tidak berjalan. Karena dua faktor antara pendidik dan peserta didik merupakan komponen paling utama dalam suatu sistem pendidikan.

B. TUJUAN MANAJEMEN PESERTA DIDIK

Tujuan manajemen peserta didik dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Tim UPI (2013) tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan (sekolah).

Adapun tujuan khusus manajemen peserta didik menurut Rahayu (2013) adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik.
2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat dan minat peserta didik.
3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik.

C. PRINSIP MANAJEMEN PESERTA DIDIK

Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka mengelola peserta didik, hal ini harus selalu dipegang dan dijadikan pedoman. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik sebagai berikut:

4. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Dalam hal ini haruslah memiliki tujuan yang sama atau mendukung tujuan terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan.
5. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik.
6. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai anekaragam latar belakang dan punya banyak perbedaan.
7. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik.
8. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat.
9. Suatu hal yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah

fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah atau madrasah ataupun di masa depan.

Manajemen peserta didik bertugas mengatur berbagai kegiatan dalam bidang peserta didik agar proses pembelajaran di sekolah atau madrasah berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat sejumlah karakteristik peserta didik yang harus diketahui menurut Sulistyorini dan M. Fathurrohman antara lain sebagai berikut:

1. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa.
2. Peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin.
3. Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain.
4. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia.
5. Peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan yang dinamis.

D. FUNGSI MANAJEMEN PSERTA DIDIK

Fungsi umum manajemen peserta didik menurut Tim UPI (2013) adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri se-optimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi social, aspirasi, kebutuhan dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Selain itu terdapat fungsi khusus

manajemen peserta didik yang dikemukakan oleh Rahayu (2013) yakni:

1. fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik.
2. fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik.
3. fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik.
4. fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik.

E. RUANG LINGKUP MANAJEMEN PESERTA DIDIK

Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Imron dalam (Muhammad Rifa'i) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan peserta didik,
2. Penerimaan peserta didik baru,
3. Orientasi peserta didik,
4. Mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik,
5. Pengelompokkan peserta didik,
6. Mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik,
7. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik,
8. Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, dan
9. Kode etik, pengadilan, hukuman dan disiplin peserta didik.

Sedangkan menurut Menurut Nasihin dan Sururi dalam (Muhammad Rifa'i) ruang lingkup manajemen peserta didik adalah:

1. Analisis kebutuhan peserta didik
2. Rekrutmen peserta didik
3. Seleksi peserta didik
4. Orientasi peserta didik
5. Penempatan peserta didik
6. Pembinaan dan pengembangan peserta didik
7. Pencatatan dan pelaporan
8. Kelulusan dan alumni.

1. Analisis Kebutuhan Peserta Didik

Analisis kebutuhan dan penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan (sekolah). Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah :

- a. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima
- b. Menyusun program kegiatan kesiswaan

Maslow menyatakan bahwa kebutuhan fisiologis akan timbul setelah kebutuhan-kebutuhan psikologis terpenuhi. Ia mengadakan klasifikasi kebutuhan dasar sebagai berikut :

- a. Kebutuhan-kebutuhan akan keselamatan
- b. Kebutuhan-kebutuhan memiliki dan mencintai
- c. Kebutuhan-kebutuhan akan penghargaan
- d. Kebutuhan-kebutuhan untuk menonjolkan diri

Maslow yakin bahwa ada hubungan dalam pemuasan kebutuhan dan berjalan secara sistematis. Misalnya: setelah kebutuhan lapar dipenuhi baru akan timbul kebutuhan senang atau makan.

2. Rekrutmen Peserta Didik

Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (madrasah) yang bersangkutan. Langkah-langkah rekrutmen peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru
- b. Menentukan syarat pendaftaran calon
- c. Menyediakan formulir pendaftaran
- d. Pengumuman pendaftaran calon
- e. Menyediakan buku pendaftaran
- f. Waktu pendaftaran
- g. Penentuan calon yang akan diterima

3. Seleksi Peserta Didik

Seleksi peserta didik dilakukan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan sistem promosi dan menggunakan sistem seleksi. Seleksi dengan sistem promosi adalah penerimaan peserta didik, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik disuatu madrasah, tidak diterima semua dengan begitu saja. Karena itu, mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem ini yang berlaku untuk peserta didik yang tidak menetap di asrama

madrasah. Sedangkan bagi peserta didik yang akan menetap di asrama madrasah peserta didik akan mengikuti sistem seleksi yaitu dengan menggunakan 3 cara. Pertama, seleksi dengan berdasarkan Daftar Nilai Ebta Murni (DANEM), yang kedua berdasarkan Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK), sedangkan yang ketiga dengan berdasarkan tes membaca Al-qur'an.

4. Orientasi Peserta Didik

Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi madrasah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Perkenalan dengan guru dan staff madrasah
- b. Perkenalan dengan peserta didik lama
- c. Penjelasan tata tertib madrasah
- d. Perkenalan dengan pengurus OSIS
- e. Mengenal situasi dan kondisi fasilitas-fasilitas/sarana dan prasarana madrasah.

Waktu orientasi biasa digunakan juga untuk penelusuran bakat-bakat khusus dari peserta didik baru, misalnya penelusuran bakat-bakat olahraga, bakat-bakat seni, bakat-bakat menulis (mengarang) dan lainnya. Oleh karena itu selama orientasi banyak diisi kegiatan-kegiatan tersebut.

5. Penempatan Peserta Ddidik

Sebelum peserta didik yang diterima pada suatu madrasah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Berdasarkan hasil tes dan seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurut Hendyat Soetopo, dasar dasar pengelompokkan peserta didik ada 5 macam, yaitu:

a. *Friendship Grouping*

Pengelompokkan peserta didik didasarkan pada kesukaan dalam memilih teman antar peserta didik itu sendiri.

b. *Achievement Grouping*

Pengelompokkan peserta didik didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Dalam pengelompokkan ini biasanya diadakan pencampuran antara peserta didik yang berprestasi tinggi dengan peserta didik yang berprestasi rendah.

c. *Aptitude Grouping*

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki peserta didik itu sendiri.

d. *Attention Or Interest Grouping*

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas perhatian atau minat yang didasari kesenangan peserta didik itu sendiri.

Pengelompokkan ini didasari oleh adanya peserta didik yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu namun si peserta didik tersebut tidak senang dengan bakat yang dimilikinya.

6. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik

Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Lembaga pendidikan (madrasah) dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler.

Kegiatan kurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan di dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pelajaran. Kegiatan kurikuler dalam bentuk proses belajar mengajar di kelas dengan nama mata pelajaran atau bidang studi yang ada di madrasah, di mana setiap peserta didik ini wajib mengikuti kegiatan kurikuler ini.

Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di luar ketentuan yang telah ada di dalam kurikulum. Kegiatan ekstra kurikuler ini biasanya terbentuk berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap peserta didik tidak harus mengikuti semua kegiatan ekstra kurikuler. Bisa dikatakan bahwa kegiatan ekstra kurikuler ini merupakan wadah kegiatan peserta didik di luar pelajaran atau di luar kegiatan kurikuler. Contoh kegiatan ekstra kurikuler: OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), ROHIS (Rohani Islam), kelompok karate, kelompok silat, kelompok basket, pramuka, kelompok teater, dan lain-lain.

7. Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan pencatatan dan pelaporan

Ini dimulai sejak peserta didik itu diterima di madrasah tersebut sampai mereka tamat atau lulus dari madrasah tersebut. Untuk melakukan pencatatan dan pelaporan diperlukan peralatan dan perlengkapan yang dapat mempermudah. Peralatan dan perlengkapan tersebut biasanya berupa:

a. Buku induk peserta didik

Buku ini disebut juga buku pokok atau stambuk. Buku ini berisi catatan tentang peserta didik yang masuk pada sekolah tersebut.

b. Buku klapper

Pencatatan buku ini dapat diambil dari buku induk, tetapi penulisannya disusun berdasarkan abjad. Hal ini untuk memudahkan pencarian data peserta didik kembali jika sewaktu-waktu diperlukan.

c. Daftar presensi

Daftar hadir peserta didik sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui/dikontrol.

8. Kelulusan dan Alumni

Proses kelulusan adalah kegiatan yang paling akhir dari manajemen peserta didik, kelulusan adalah pernyataan dari madrasah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik.

Dengan demikian ruang lingkup manajemen peserta didik adalah pengaturan aktifitas-aktifitas peserta didik yang berkaitan dengan

segala sesuatu kebutuhan peserta didik dari peserta didik masuk sampai dengan lulus dari madrasah. Menurut sulistyio dan fathurrohman dalam (Ribut Suprpto), secara umum kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

F. LAYANAN KHUSUS YANG MENUNJANG MANAJEMEN PESERTA DIDIK

1. Layanan Bimbingan Konseling

Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Menurut Hendyat Soetopo (Dalam Tim UPI, 2013: 215) bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

Fungsi bimbingan di sekolah ada tiga yaitu :

- a. Fungsi Penyaluran, yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan cita-citanya.

- b. Fungsi Pengadaptasian, yaitu membantu guru untuk menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, cita-cita peserta didik.
- c. Fungsi Penyesuaian, yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuannya untuk mencapai perkembangan yang optimal.

2. Layanan Perpustakaan

Perpustakaan sekolah menurut Tim UPI (2013) merupakan perangkat kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah.

Tujuan perpustakaan sekolah :

- a. Mengembangkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca khususnya serta mendayagunakan budaya tulisan;
- b. Mendidik peserta didik agar mampu memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara efektif dan efisien;
- c. Memupuk bakat dan minat;
- d. Mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari atas usaha dan tanggung jawab sendiri.

3. Layanan Kantin

Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Pengelola kantin sebaiknya dipegang oleh orang dalam atau keluarga karyawan sekolah yang

bersangkutan, agar segala makanan yang dijual di kantin terjamin dan bermanfaat bagi peserta didik.

4. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah.

Program Usaha Kesehatan Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai lingkungan hidup yang sehat,
- b. Pendidikan kesehatan,
- c. Pemeliharaan kesehatan di sekolah.

5. Layanan Asrama

Manfaat asrama bagi peserta didik:

- a. Tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya terutama jika berbentuk tugas kelompok.
- b. Sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik.
- c. Jika diantara peserta didik mempunyai kesulitan (kiriman dari orang tua terlambat, sakit, dan sebagainya) dapat saling membantu.
- d. Merupakan salah satu cara mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik.

BAGIAN 6 KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

A. PENGERTIAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

Salah satu perangkat yang harus ada dalam lembaga pendidikan adalah kurikulum karena memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Wales dan Bondi dalam Hamdan (1994:1) mengemukakan bahwa kurikulum pertama kali ditemukan di Skotlandia pada awal tahun 1820 dan istilah tersebut secara modern pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat satu abad kemudian. Istilah kurikulum menurut Kamus *Webste's Third New International Dictionary* menyebutkan kata kurikulum berasal dari Bahasa Latin yaitu *Currere* berupa kata kerja *to run* yang berarti lari cepat, tergesa-gesa atau menjalani. Dari beberapa arti etimologi di atas nampak kata kurikulum sebelumnya digunakan dalam bidang olahraga khususnya bidang atletik, namun perkembangan selanjutnya istilah tersebut lebih populer digunakan dalam bidang Pendidikan.

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini menandakan bahwa kurikulum bukanlah sekedar rencana belaka melainkan terdiri dari beberapa

komponen seperti komponen tujuan, isi dan bahan pelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran.

Jika dibawa pada pengertian kurikulum PAI maka kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam yang sekaligus juga arah Pendidikan agama dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *Insan Kamil*. Kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan suatu program pendidikan yang memiliki makna, segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam mengembangkan segala potensi fitrah yang ada pada peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam Islam yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan mampu menjadi khalifah di muka bumi ini.

B. FUNGSI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam proses implementasinya memiliki beberapa fungsi yang dalam tulisan ini fungsi diartikan sebagai peran. Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbeda dengan kurikulum-kurikulum yang lain yang memiliki fungsi atau peranan sebanyak yang dimiliki kurikulum PAI. Adapun beberapa fungsi kurikulum PAI yang penulis kemukakan berdasarkan pendapat Hamdan (2014:106) sebagai berikut:

1. Fungsi Pengembangan dalam artian kurikulum PAI berupaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan

peserta didik kepada Allah Swt yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.

2. Fungsi penyaluran dalam artian bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam berfungsi untuk menyalurkan peserta didik yang mempunyai bakat-bakat khusus dalam bidang keagamaan agar bakat tersebut dapat berkembang secara wajar dan optimal .
3. Fungsi perbaikan dalam artian bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kelemahan peserta didik terhadap keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari terutama dari segi keyakinan (Aqidah) dan Ibadah.
4. Fungsi pencegahan artinya kurikulum Pendidikan Agama Islam berfungsi untuk menangkal hal-hal negatif baik yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya, maupun dari budaya luar yang dapat membahayakan dirinya sehingga menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
5. Fungsi penyesuaian artinya kurikulum Pendidikan Agama Islam berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan baik fisik, lingkungan sosial, dan pelan-pelan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam
6. Sumber nilai artinya kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan sumber yang dapat dijadikan acuan dalam mempelajari pedoman hidup manusia (Al Qur'an dan Hadits) untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan diakhirat kelak.

C. KARAKTERISTIK KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

Karakteristik kurikulum sebagai program Pendidikan Islam idealnya tidak hanya menempatkan peserta didik sebagai objek didik melainkan sebagai subjek yang sedang mengembangkan diri menuju kedewasaan sesuai dengan konsep Islam. Oleh karena itu kurikulum tidak akan membawa makna yang signifikan jika tidak dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang dapat menciptakan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik.

Karakteristik kurikulum Pendidikan Islam secara umum adalah pencerminan nilai-nilai Islami yang dihasilkan dari pemikiran kefilsafatan yang termanifestasi dalam seluruh kegiatan Pendidikan. Karakteristik inilah yang akan menjadi pembeda antara kurikulum agama dan kurikulum umum yang diterapkan di lembaga Pendidikan. Kurikulum Pendidikan Islam memiliki ciri khusus atau karakteristik dibandingkan dengan kurikulum Pendidikan pada umumnya. Al-Syaibany mengemukakan ada 5 ciri khusus atau karakteristik yang dimiliki oleh kurikulum Pendidikan Islam yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat dan tekniknya bercorak ragam.
2. Meluas cakupannya dan menyeluruh kandungannya, yaitu kurikulum harus betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran dan ajaran yang menyeluruh. Disamping itu, kurikulum memiliki perhatian yang luas yaitu memperhatikan

pengembangan dan bimbingan terhadap segala aspek kepribadian peserta didik dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual.

3. Menyeimbangkan berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Selain itu, menyeimbangkan antara pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan pengembangan sosial.
4. Menyeluruh dalam menata seluruh mata Pelajaran yang diperlukan oleh peserta didik
5. Menyesuaikan bakat dan minat peserta didik

Dari uraian pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kurikulum Pendidikan Islam pada intinya adalah kurikulum yang dapat memotivasi peserta didik untuk berakhlak atau berbudi pekerti luhur baik kepada sang Pencipta, diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Kurikulum Pendidikan Islam harus diupayakan agar mampu mengantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan dapat selamat di dunia dan diakhirat kelak.

D. PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

Kata pengembangan menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto dalam buku yang ditulis oleh Hamdan (2014;5) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan

penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Jika dikaitkan dengan kurikulum maka menjadi pengembangan kurikulum yang memiliki makna menyusun kurikulum baru, melaksanakan kurikulum baru disekolah-sekolah secara terbatas yang disertai dengan penilaian yang intensif, atau seperti uji coba kurikulum baru, dan menyempurnakan terhadap komponen tertentu dalam kurikulum berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sejak orde baru telah terjadi beberapa kali perubahan atau pergantian kurikulum hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah saja terjadi karena pengembangan kurikulum adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan Pendidikan. Pakar kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu tahapan dari adanya keterjalinan, hubungan antar komponen kurikulum yaitu antara komponen tujuan, bahan, kegiatan dan evaluasi. Keempat komponen tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Cawsell tentang pengembangan kurikulum yang dikutip oleh Ahmad adalah sebagai alat untuk membantu guru dalam melakukan tugas mengajarkan bahan, menarik minat siswa, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara menurut Beane, Toefer dan Allesia dalam buku karya Ahmad menyatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses dimana partisipasi pada berbagai tingkat dalam membuat keputusan tentang

tujuan, bagaimana tujuan direalisasikan melalui proses belajar mengajar dan apakah tujuan dan alat itu serasi dan efektif.

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sebelumnya sehingga dapat menghasilkan kondisi belajar yang lebih baik dari sebelumnya.

Jika ditarik pada kurikulum PAI maka pengembangan kurikulum PAI adalah suatu kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses mengkaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik dari sebelumnya, dan pengembangan kurikulum PAI adalah suatu kegiatan penyusunan untuk melakukan desain pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum PAI dari yang sebelumnya.

Realitas sejarah menggambarkan bahwa pada proses pengembangan kurikulum PAI mengalami perubahan-perubahan paradigma walaupun paradigma sebelumnya ada beberapa yang tetap dipertahankan. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa fenomena yang terjadi dalam proses pengembangan kurikulum itu sendiri. Proses pengembangan kurikulum perlu untuk memperhatikan acuan yang berorientasi pada pemanfaatan hasil Pendidikan yang menggunakan kurikulum yang telah dikembangkan. Muhammad Ali berpendapat yang dikutip oleh Hamdan (1994:38)

bahwa pemilihan acuan dan asas-asas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut:

1. Arah kurikulum mengacu kepada sesuatu yang diyakini dengan kebenaran atau kebaikan oleh masyarakat,
2. Pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh siswa melalui Pendidikan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat,
3. Materi yang menjadi isi kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi
4. Proses belajar mengajar berpedoman pada teori-teori psikologi, baik psikologi belajar maupun psikologi perkembangan.

Selain asas yang telah penulis kemukakan sebelumnya maka yang perlu juga diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah mengenai prinsip dalam pengembangan kurikulum itu sendiri terutama pada Pendidikan Agama Islam. Prinsip pengembangan kurikulum sangat penting untuk diperhatikan karena prinsip-prinsip dasar tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Prinsip relevansi, artinya kurikulum yang dikembangkan harus relevan dengan kebutuhan lingkungan pengguna.
- Prinsip efektifitas dan efisiensi, artinya proses pengembangan kurikulum harus cermat memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi sehingga strategi yang diterapkan

benar-benar efektif dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan untuk efisiensinya kurikulum yang dikembangkan harus memperhitungkan aspek ekonomi agar tidak memakan biaya yang besar dalam pelaksanaannya.

- Prinsip kesinambungan artinya kesinambungan antara berbagai jenjang sekolah dan kesinambungan antara berbagai pelajaran
- Prinsip Fleksibilitas artinya kurikulum yang dikembangkan tidak boleh kaku dalam artian bahwa harus ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan kepada pengguna kurikulum untuk bertindak di lapangan.
- Prinsip berorientasi pada tujuan artinya sebelum bahan ditentukan maka langkah yang pertama adalah menentukan tujuan terlebih dahulu agar proses yang dilaksanakan menjadi terarah.
- Prinsip pendidikan seumur hidup (*Long Life Education*) artinya proses Pendidikan yang di dalamnya adalah kurikulum sebagai landasan pacunya bukan hanya pelaksanaannya dimonopoli sekolah melainkan proses Pendidikan dapat dilakukan di luar sekolah sehingga seluruh komponen terlibat dan berlangsung terus menerus selama roda kehidupan berjalan.

Prinsip-prinsip tersebut memiliki maksud bahwa pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus-menerus yakni dengan cara mengadakannya terhadap pelaksanaan dari hasil-hasil yang telah dicapai untuk melakukan perbaikan pematapan dan

pengembangan lebih lanjut. Disamping membahas tentang prinsip perlu juga diketahui tentang model-model pengembangan Kurikulum Hamdan (2014:56) itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- *The administrasi Model*

Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama demikian karena inisiatif dan gagasan pengembangan muncul atau datang dari para administrator Pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi.

- *The Grass Roots Model*

Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi datang dari bawah yaitu guru-guru atau sekolah. Model pengembangan kurikulum ini digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan/kurikulum yang bersifat desentralisasi.

- *Beutchamp's System*

Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beuchamp seorang ahli kurikulum. Beauchamp mengemukakan 5 hal di dalam pengembangan suatu kurikulum. **Pertama**, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah suatu sekolah kecamatan, kabupaten atau seluruh negara. **Kedua**, menetapkan personalia yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. **Ketiga**, organisasi

dan prosedur pengembangan kurikulum. **Keempat**, implementasi kurikulum. **Kelima**, evaluasi dan revisi kurikulum.

- *The Demonstration Model*

Model demonstrasi pada dasarnya bersifat *grass root's* datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerjasama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum berdasarkan kebutuhan sekolah.

- *Taba's Inverted Model*

Menurut cara yang tradisional pengembangan kurikulum dilakukan secara deduksi dengan urutan penentuan prinsip-prinsip dan kebijaksanaan dasar, merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh didasarkan atas komitmen-komitmen tertentu, menyusun unit-unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh, dan melaksanakan kurikulum di dalam kelas.

- *Roger Interpersonal Relation Model*

Empat langkah pengembangan kurikulum model *Rogers* yaitu pemilihan target dari sistem Pendidikan, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran, dan partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok.

BAGIAN 7

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM

A. KONSEP DAN DEFINISI MANAJEMEN PEMBIAYAAN

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mendukung pendidikan Islam. Konsep dan definisi manajemen pembiayaan pendidikan Islam mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan dana, alokasi anggaran, pengumpulan dan penggunaan dana, serta evaluasi keuangan dalam konteks lembaga atau sistem pendidikan Islam.

Berikut adalah beberapa poin yang dapat membantu memahami konsep dan definisi manajemen pembiayaan pendidikan Islam:

1. Perencanaan Keuangan

Manajemen pembiayaan pendidikan Islam melibatkan perencanaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk operasionalisasi institusi atau sistem pendidikan Islam. Ini mencakup perencanaan anggaran tahunan, perencanaan jangka panjang, dan identifikasi sumber daya keuangan yang tersedia.

2. Pengumpulan Dana

Salah satu aspek penting dari manajemen pembiayaan adalah bagaimana dana dikumpulkan. Ini bisa melibatkan berbagai sumber, seperti biaya pendidikan, dana donasi, hibah, atau

sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Alokasi Dana

Setelah dana terkumpul, manajemen pembiayaan harus mengalokasikan sumber daya ini secara efisien dan sesuai dengan prioritas pendidikan Islam. Hal ini bisa mencakup alokasi dana untuk fasilitas, program pendidikan, pembayaran gaji staf, dan lain-lain.

4. Penggunaan Dana

Penggunaan dana harus dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Dana harus digunakan untuk tujuan pendidikan Islam dan harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

5. Evaluasi Keuangan

Manajemen pembiayaan juga mencakup evaluasi keuangan secara berkala. Ini mencakup audit keuangan, pemantauan pengeluaran, dan pengukuran efisiensi penggunaan dana.

Perlu dipahami bahwa manajemen pembiayaan pendidikan Islam bertujuan untuk memastikan keberlanjutan, kualitas, dan aksesibilitas pendidikan Islam yang berkualitas, sambil mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan sumber daya keuangan.

B. PRINSIP – PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Berikut ini adalah penjabarannya:

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Dilembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab.

3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif

outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

- a. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
- b. Dilihat dari segi hasil, Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

C. TUJUAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN

Menurut Dedy Achmad Kurniady tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan.

Hadari Nawawi menjelaskan seperti yang dikutip oleh Arwildayanto bahwamanajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengelolakeuangan lembaga pendidikan dengan membuat berbagai kebijaksanaan dalam pengadaan, penggunaan keuangan guna mewujudkan kegiatan organisasi lembaga pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan lembaga pendidikan itu sendiri.

Menurut Suad Husnan tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan adalah agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang di terapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah mencapai visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

D. SUMBER – SUMBER PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan Islam dapat berasal dari berbagai sumber, dan sumber-sumber ini dapat berbeda – beda. Berikut beberapa sumber pembiayaan pendidikan Islam yang umum:

2. Dana Pemerintah

Pemerintah sebagai pengelola negara wajib mengalokasikan biaya pendidikan hal ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan 4 bahwa, Setiap warga Negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Kemudian negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Hayati, 2019).

3. Wakaf

Dalam sistem pendidikan Islam klasik, antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan, sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syariat Islam dan adanya keseimbangan antara ekonomi dan kemaslahatan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah dan

demikian kemaslahatan bersama. Dengan demikian maka wakaf dapat digunakan sebagai *alternative* untuk memperoleh sumber pembiayaan pendidikan hal ini senada dengan hadits Nabi.

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan”. (HR Bukhari dan Muslim) (Zulfa 2016).

4. Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan merupakan kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan. Beberapa negara mengalokasikan sebagian dari zakat untuk pendidikan Islam, termasuk beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.

5. Donasi dan Sumbangan

Individu, organisasi, atau kelompok komunitas sering memberikan donasi dan sumbangan untuk mendukung pendidikan Islam. Sumbangan ini dapat digunakan untuk membangun atau mengoperasikan sekolah-sekolah Islam, membayar guru, atau menyediakan beasiswa.

6. Biaya Pendidikan dan Uang Sekolah

Di banyak sekolah Islam, biaya pendidikan dikenakan kepada siswa atau orang tua siswa sebagai sumber pendanaan. Uang sekolah ini kemudian digunakan untuk membiayai operasional sekolah.

E. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran pembiayaan pendidikan Islam merupakan aspek kunci dalam memastikan keberhasilan dan kelangsungan pendidikan Islam. Berikut adalah beberapa langkah dan prinsip yang dapat diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran pembiayaan pendidikan Islam:

1. **Identifikasi Kebutuhan:** Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan pendidikan Islam di wilayah atau komunitas tertentu. Ini melibatkan analisis terhadap jumlah siswa, keadaan fasilitas pendidikan, dan kebutuhan pengajaran.
2. **Penyusunan Rencana Strategis:** Setelah kebutuhan diidentifikasi, buat rencana strategis untuk pengembangan pendidikan Islam. Rencana ini harus mencakup visi, misi, dan tujuan jangka panjang pendidikan tersebut.
3. **Penganggaran Pendapatan:** Tentukan sumber pendapatan yang tersedia untuk pembiayaan pendidikan Islam. Ini mencakup anggaran pemerintah, wakaf, donasi, zakat, dana sekolah, dan sumber-sumber lainnya.

4. **Perencanaan Anggaran:** Setelah mengidentifikasi sumber pendapatan, buat anggaran yang rinci untuk pendidikan Islam. Anggaran ini harus mencakup biaya operasional (gaji guru, pemeliharaan fasilitas, pembelian peralatan), biaya program (buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler), dan proyek-proyek jangka panjang (pembangunan atau renovasi fasilitas).
5. **Prioritaskan Penggunaan Dana:** Tentukan prioritas penggunaan dana sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan kebutuhan mendesak. Pastikan bahwa dana dialokasikan dengan adil dan efisien.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara transparan. Informasikan kepada pihak yang berkepentingan (orang tua, masyarakat, donatur) mengenai penggunaan dana, dan berikan laporan keuangan yang jelas dan teratur.
7. **Pengelolaan Risiko:** Identifikasi dan kelola risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan rencana pembiayaan pendidikan Islam. Ini bisa termasuk risiko perubahan dalam sumber pendapatan atau biaya yang tidak terduga.
8. **Pengembangan Sumber Pendapatan:** Selain mengandalkan sumber pendapatan yang ada, pertimbangkan pengembangan sumber pendapatan baru. Ini bisa melibatkan kampanye penggalangan dana, kolaborasi dengan lembaga keuangan Islam, atau pengembangan proyek wakaf.
9. **Evaluasi dan Pemantauan:** Selalu lakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana dan pencapaian tujuan pendidikan

Islam. Pantau kemajuan yang telah dicapai dan sesuaikan rencana dan anggaran jika diperlukan.

10. Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat: Libatkan masyarakat, orang tua siswa, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dapatkan masukan dan dukungan mereka untuk memastikan kesuksesan pendidikan Islam.

F. PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan

madrasah/sekolah. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber - sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Kegiatan yang di lakukan berupa :

1. Pemasukkan Biaya Pendidikan
2. Pengeluaran Biaya Pendidikan

G. STUDI KASUS SUKSES

Berikut adalah studi kasus tentang sukses manajemen pembiayaan pendidikan Islam:

Studi Kasus: SMP Lab School UNESA

Pada proses perencanaan keuangan SMP Labschool UNESA 2 ketintang dilakukan beberapa tahap. Hal ini dilakukan agar segala bentuk perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masa yang akan datang yakni dengan menyusun RAPBS. Tahapan tersebut ialah dimulai dengan menganalisa kebutuhan yang diperlukan serta kegiatan yang akan dilaksanakan dan melakukan penyusunan keuangan dalam waktu satu tahun anggaran. Penyusunan Sesuai dengan penuturan bendahara SMP Labschool UNESA 2 Ketintang:

“Penyusunan rancangan keuangan diawali dengan menyusun RAPBS yang dimulai dengan Menyusun rencana pengeluaran tahunan, menentukan program kerja dan rincian program, menetapkan kebutuhan dan menghitung dana yang dibutuhkan”.

Perencanaan keuangan sekolah diimplementasikan dalam bentuk Rencana Anggaran Belanja Pendapatan Sekolah (RABPS). Rencana Anggaran Belanja Pendapatan Sekolah (RABPS) merupakan suatu dokumen yang berisi perencanaan program kerja dan pengembangan sekolah dalam satu tahun anggaran berjalan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan untuk menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan berdasarkan visi dan misi lembaga pendidikan. Rencana Anggaran Belanja Pendapatan Sekolah (RABPS) dapat membantu Bendahara Sekolah dalam merencanakan keuangan sekolah dalam satu tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya RABPS dapat pula membantu Bendahara Sekolah dalam mengatur keuangan sekolah dan sebagai pengambilan keputusan dalam pengendalian keuangan sekolah. Setiap awal tahun anggaran masing-masing bidang kerja yang meliputi:

1. Kepala Tata Usaha dan
2. Bendahara Sekolah

Membuat program kerja sekolah yang memuat:

1. Indikator pencapaian program kerja,
2. Uraian kegiatan,

3. Jadwal.

H. KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan Islam adalah proses penting dalam menjalankan lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa kesimpulan penting mengenai manajemen pembiayaan pendidikan Islam:

Tujuan utama dari manajemen pembiayaan pendidikan Islam adalah untuk memastikan pendidikan Islam yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan Islam dapat bervariasi, termasuk dana pemerintah, wakaf, zakat, donasi, biaya sekolah, dan lain-lain. *Diversifikasi* sumber pembiayaan dapat membantu menjaga keberlanjutan.

Prinsip-prinsip Manajemen pembiayaan pendidikan Islam harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah, termasuk larangan riba dan investasi dalam kegiatan yang bertentangan dengan Islam.

Transparansi dalam penggunaan dana dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana merupakan prinsip kunci dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam. Laporan keuangan yang jelas harus diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

Penting untuk merencanakan pembiayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang, termasuk untuk pemeliharaan fasilitas dan pengembangan program pendidikan.

Evaluasi terhadap penggunaan dana dan pencapaian tujuan pendidikan Islam perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Manajemen pembiayaan pendidikan Islam adalah proses yang dinamis, dan lembaga-lembaga pendidikan perlu terus-menerus berupaya meningkatkan manajemen pembiayaan mereka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang lebih baik.

Dengan penerapan prinsip-prinsip ini dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam, dapat memungkinkan penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

BAGIAN 8

MUTU SEKOLAH/MADRASAH

A. PENGERTIAN MUTU PENDIDIKAN

Mutu berasal dari bahasa latin yaitu “*quails*” yang berarti *what kind of* (tergantung kata apa yang mengikutinya). Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan kebutuhan. (Husain Usman, 2006).

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normative dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar. (Oemar Hamalik, 1990).

Menurut Sallis, "*quality assurance is about consistently meeting product specification or getting things right first time, every time.*" yang berarti jaminan kualitas adalah tentang konsisten memenuhi spesifikasi produk atau mendapatkan hal yang benar tepat waktu, setiap saat. Lebih lanjut Sallis menjelaskan, "*quality assurance is about designing quality into the process to attempt to ensure that the products is produced to predetermined specification. Put simply, quality assurance is a means of producing defect and fault-free products.*" yang berarti jaminan mutu didesain sedemikian rupa untuk

menjamin bahwa proses produksi menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sederhananya, jaminan kualitas adalah alat untuk menghasilkan produk dan bebas dari kesalahan. (Edward Sallis, 2002)

Secara istilah mutu adalah “Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.” (M.N. Nasution, 2004). Mutu adalah *sebuah* proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Dalam sekolah mutu, standar mutu ditetapkan untuk setiap rangkaian kerja didalam keseluruhan proses kerja, bila pekerja mencapai standart mutu untuk masing-masing rangkaian kerja, hasil akhirnya adalah sebuah produk bermutu. Saat membicarakan perbaikan mutu pendidikan, sering kali yang dibicarakan adalah perbaikan peringkat kenaikan kelas atau nilai rapor. Dalam sekolah yang bertepi seperti itu, tanggung jawab perbaikan mutu pendidikan lebih banyak ada pada guru. Secara umum para guru terfokus hanya pada aspek pendidikan seorang siswa: membantu siswa belajar dan mendapatkan pengetahuan. Bila mutu dimulai sebagai proyek terisolasi di sekolah atau ruang kelas, dan hal tersebut hampir mempengaruhi keseluruhan mutu pendidikan. (Jerome S Arcaro, 2005)

Sedangkan mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan *output* yang setinggi-tingginya. (Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, 1994)

Pada hakekatnya mutu dalam pendidikan mencakup input, proses dan output. Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas dan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan serta lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Pratiwi, 2019).

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Dzaujak bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam mengelola secara operasional dan efisien terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan sekolah sehingga nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. (Ahmad Dzaujah, 1996)

Istilah penjaminan mutu (*quality assurance*) pada awalnya digunakan di lingkungan dunia bisnis barang dan jasa, dengan maksud untuk menumbuhkan budaya peduli mutu. Jaminan mutu perlu dilakukan oleh perusahaan/lembaga untuk memberikan kepuasan kepada customer pemakai produk. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan. (Joremo S Arcaro, 2005).

Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang *memenuhi* atau melebihi harapan pelanggan (konsumen). (Jerri H. Makawimbang, 2011).

Menurut Sallis dalam Sudarwan mengungkapkan bahwa mutu dapat *diartikan* sebagai derajat kepuasan luar biasa yang di terima oleh kostumer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Achmad mengemukakan bahwa, mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. (Saudarwan Danim, 2003)

Mutu memerlukan waktu, proses dan ketelatenan untuk mewujudkan ide-ide baru dengan baik sejak awal. Tiap langkah dalam mewujudkan mutu diperlukan disiplin untuk selalu memenuhi seluruh persyaratan pekerjaan agar hasil yang diharapkan terwujud. Dalam sebuah lembaga mutu yang baik lahir dari disiplin bersama, tanggung jawab bersama, dan komitmen bersama.

Menurut Crosby mutu ialah conformance to retirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau standarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, produk jadi. Abdul Hadi dan Nurhayati, 2010)

Mutu adalah konsep yang kompleks. Hal ini dinyatakan Dalrymple sebagai berikut: "quality is conceptually complex and represents a synthesis of lessons, methods, and acquired knowledge from a range of disciplines" Akibatnya pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dapat difungsikan dengan kompleksitas dan luasnya pandangan mengenai mutu, karena pemahaman akan mutu terkait dengan pengalaman, metode dan pengetahuan dari berbagai bidang keilmuan. Dengan luasnya cakupan mutu, pendidikan hendaknya membuat skala prioritas dalam pengembangan mutu jangka pendek dan jangka panjang. Iye Haji Hasan, 2013).

Setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Walaupun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan mutu, terutama jika mutu tersebut sudah menjadi kebiasaan kita. Namun, ironisnya kita hanya bisa menyadari keberadaan mutu tersebut saat mutu hilang. Satu hal yang biasa kita yakini adalah mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan yang sebaliknya. Bertolak dari kenyataan tersebut, mutu dalam pendidikan akhirnya merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. (Edward Sallis, 2006).

Mutu dalam pendidikan bukanlah barang akan tetapi layanan, di mana mutu harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan

keinginan semua pihak/pemakai dengan fokus utamanya terletak pada peserta didik (*leaners*). (Sofan Amri, 2013)

Secara konsep mutu dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) konsep absolut, mutu pada konsep ini memungkinkan kepala sekolah untuk merumuskan standar maksimal, kepala sekolah akan berpikir bahwa sekolah yang dipimpin harus selalu menjadi sekolah unggulan baik bertaraf nasional maupun internasional tapi pada kenyataannya hal ini sulit untuk direalisasikan. Pada konsep ini mutu akan menjadi simbol status bagi pelanggan internal maupun eksternal, sehingga stakeholder akan merasa bangga dan merasa puas, khususnya bagi orang tua peserta didik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

B. DASAR DAN PRINSIP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Penjaminan mutu merupakan keseluruhan proses dalam penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelola yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, untuk dapat mencapai visi dan misi sebagai bentuk tanggung jawab dan pemenuhan janji kepada *stakeholders*. (Zahrok, 2020)

Peningkatan mutu pendidikan bagi sebuah lembaga pendidikan saat ini merupakan prioritas utama. Hal ini bagian terpenting dalam membangun pendidikan yang berkelanjutan. Menurut Hensler dan Brunell dalam Husaini Usman, ada empat prinsip utama dalam manajemen mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Pelanggan

Mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan.

2. Respek Terhadap Setiap Orang

Setiap orang di lembaga pendidikan dipandang memiliki potensi.

3. Manajemen Berdasarkan Fakta.

Pendidikan berorientasi pada fakta, maksudnya setiap keputusan selalu didasarkan pada fakta, bukan pada perasaan (*feeling*) atau ingatan semata.

4. Perbaikan Terus-menerus

Agar dapat sukses setiap lembaga pendidikan perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. (Husaini Usman, 2011).

Sedangkan menurut Aan Komaria, mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip mutu pendidikan penerapannya sebagai berikut:

1. Penerapan khusus prinsip pertama orientasi pada pelanggan.
2. Penerapan khusus prinsip kedua Kepemimpinan.
3. Penerapan khusus prinsip ketiga keterlibatan orang-orang.

4. Penerapan khusus prinsip keempat pendekatan proses.
5. Penerapan khusus prinsip kelima menggunakan pendekatan sistem pada manajemen.
6. Penerapan khusus prinsip keenam perbaikan secara berkelanjutan.
7. Penerapan khusus prinsip ketujuh pendekatan aktual dalam pembuatan keputusan.
8. Penerapan khusus prinsip kedelapan hubungan yang saling menguntungkan dengan supplier. (Aan Komariah dkk, 2010)

Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut.

1. Komitmen pada perubahan
Pemimpin atau kelompok yang ingin menerapkan program mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Pada intinya, peningkatan mutu adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berbobot. Lazimnya, perubahan tersebut menimbulkan rasa takut, sedangkan komitmen dapat menghilangkan rasa takut.
2. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada
Banyak kegagalan dalam melaksanakan perubahan karena melakukan Sesuatu sebelum sesuatu itu jelas.
3. Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan
Hendaknya, perubahan yang akan dilakukan berdasarkan visi tentang perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

Pada awalnya, visi tersebut hanya dimiliki oleh pimpinan atau seorang inovator, kemudian dikenalkan kepada orang-orang yang akan terlibat dalam perubahan tersebut. Visi dapat menjadi pedoman yang akan membimbing tim dalam perjalanan pelaksanaan program mutu.

4. Mempunyai rencana yang jelas

Mengacu pada visi, sebuah tim menyusun rencana dengan jelas. Rencana menjadi pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu. Pelaksanaan program mutu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal ataupun eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut akan selalu berubah. Rencana harus selalu di *up-dated* sesuai dengan perubahan-perubahan. Tidak ada program mutu yang terhenti (stagnan) dan tidak ada dua program yang identik karena program mutu selalu berdasarkan dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Program mutu merefleksikan lingkungan pendidikan di manapun ia berada. Nana Syaodih, dkk.

Mutu merupakan suatu hal yang dapat mengukur tingkat kualitas pengelolaan pendidikan yang baik dan sebaliknya. Mutu pendidikan merupakan tolak ukur ketercapaian penyelenggaraan pendidikan baik di madrasah/sekolah begitu pula di perguruan tinggi sehingga dapat di bedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin keberlangsungan dan perkembangan pendidikan dalam meraih status di tengah persaingan dunia secara global yang mengarah pada pendidikan yang makin

maju dan berkembang. Setiap lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan pendidikan yang bermutu untuk melahirkan generasi yang unggul dan berkarakter.

C. PENERAPAN PENJAMINAN MUTU DI SEKOLAH/ MADRASAH

Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas bagi semua komponen yang ada di madrasah. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika madrasah memiliki sikap dinamis, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini madrasah diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan peserta didiknya. (Anajih, 2019)

Mengenai mutu pendidikan dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pasal 2 ayat 1 Tentang Standar Nasional Pendidikan “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana. Dapat dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Menurut Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP), penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling

berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi pendidikan. Penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses penjaminan mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan. (Prayoga et al., 2019)

Penjaminan mutu terhadap pendidikan nasional, salah satunya diwujudkan dalam kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional serta mempertegas komitmen pemerintah untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu sebagaimana *tertulis dalam Pasal 5 Ayat (1), yang dirumuskan dalam kalimat berikut: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."* (Soedijarto, 2008). *Pengertian bermutu yang dimaksud adalah yang memenuhi delapan*

standar pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP, dan penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. (Niki Sae, Macintosh Setting, 2005)

Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan mutu juga tercermin dalam rumusan Visi dan Misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Sedangkan misinya adalah: (1) meningkatkan ketersediaan pendidikan; (2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan; (3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; (4) meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; (5) meningkatkan kepastian/ jaminan memperoleh layanan pendidikan. (Muhammad, 2011)

Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, aplikasi metode, strategi dan pendekatan, pendidikan yang mutakhir

dan moderem, evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara professional, sumber daya manusia yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan professional. Hadis dan Nurhayati, 2010).

Pengembangan mutu madrasah tidak bisa dilepaskan dari peran serta (partisipasi) masyarakat, khususnya orangtua wali murid yang biasanya dikoordinir dalam wadah komite madrasah. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik madrasah, komunitas madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan madrasah. Komite bertugas untuk memberikan dukungan teknis secara mandiri dan professional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah.(Astarina & Asnafiyah, 2019)

Standar mutu yang harus dipenuhi sekolah atau madrasah jika ingin bermutu dan dapat bersain dengan lembaga pendidikan lainnya adalah memperbaiki kualitas lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan Standar pembiayaan pembelajaran.

BAGIAN 9

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. PENGERTIAN KEPEMIMPINAN DAN PENDIDIKAN ISLAM

1. Pengertian Kepemimpinan

Secara umum, kepemimpinan (*leadership*) adalah kegiatan manusia dalam kehidupan. Secara etimologi, kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “pimpin” yang jika mendapat awalan “me” menjadi “memimpin” yang berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. (Wahyu Wijaswanto. 1999)

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kepemimpinan. Antara lain :

- a. Menurut Soekarto Indra Fachrudi kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan jika perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. (Soekarto Indra Fachrudi 1983)
- b. Menurut Nanang Fattah “Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan”. (Nanang Fattah, 1996)

- c. Menurut Kartini Kartono “Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan”. (Kartini Kartono. 1998)

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan untuk mendorong atau mempengaruhi dalam lingkup pergerakan pelaksanaan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam kegiatannya pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas pemimpin harus memberikan arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Pendidikan Islam

Pengertian Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan batin dan jasmani menurut ajaran islam dengan hikmah, membimbing, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Dalam pengertian ini dapat diartikan bahwa tujuan proses pendidikan Islam adalah mempengaruhi jiwa peserta didik melalui suatu proses yang menuntun setahap demi setahap kepada tujuan yang telah

ditetapkan, yaitu mendorong akhlak dan ketakwaan serta melindungi kebenaran sehingga orang bisa berkembang. karakter dan kepribadian yang baik. kebajikan Ajaran Islam.

Definisi pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia, tentang tempattempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Jadi pendidikan ini hanyalah untuk manusia saja.

B. KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain baik mempengaruhi individu, organisasi atau lembaga agama, Lembaga pendidikan, lembaga masyarakat maupun lembaga-lembaga lainnya. Pemimpin adalah seorang yang bisa memanej baik untuk dirinya, orang lain maupun organisasi yang dipimpinya (Ramli, 2017) (Rival & Mulyadi, 2003, p.2). Manajemen yang paling utama adalah manajemen diri. Dimana seorang yang mampu memanej dirinya dari segi waktu maka pada saat dia menjadi pemimpin yang mampu memanfaatkan dengan baik waktu karena waktu adalah uang. Waktu yang digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga manfaat bagi dirinya.

Pemimpin yang amanah maka akan menjadi nilai keteladanan bagi orang lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Karakter seperti inilah

yang sebenarnya dikatakan sebagai pemimpin karena kepribadian yang baik dapat mempengaruhi orang lain yang ada disekitarnya. (Kartono 1984, p. 181). Pemimpin yang baik memahami bahwa keteladanan yang diberikannya berdaya pengaruh jauh lebih hebat dibandingkan bila hanya mengkhobatkannya. (Komri, 2015). Kepemimpinannya telah mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak karimah dengan prinsip Islam. (Hutagaluh & Aslan 2019) kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah pemimpin yang adil bijaksana arif, sabar, sederhana dan sifat-sifat yang terpuji lainnya. (Mahmuddin 2014).

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki tujuan bukan hanya mengendepankan kepentingan secara pribadi akan tetapi membawa manfaat kepada masyarakat banyak.

Kepemimpinan bukan hanya larut dan terbuai dengan perubahan zaman tetapi harus mampu menjawab tantangan zaman. Di lain sisi seorang pemimpin harus mampu menjadikan dirinya teladan untuk orang lain yang mana teladan tersebut terintegrasi dari bawahan-bawahannya maupun yang dipimpinya yang di kenal dengan *integrasi*. Maka seorang pemimpin harus bisa mengutamakan dan menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Istilah kepemimpinan dalam perspektif Islam dapat dilihat dalam Al-Quran. Diantara surat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kepemimpinan adalah surat Al-Baqarah (2) ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu, dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sungguh Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah : 2)

C. DASAR DAN KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Istilah kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengertian, yaitu kata pendidikan menerangkan di lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat dan ciri-ciri kepemimpinan, yaitu bersifat mendidik dan membimbing. Sebagaimana kata pendidikan yang menunjukkan arti yang dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Pendidikan sebagai usaha atau proses pendidik dan mengajar seperti yang dikenal sehari-hari.
2. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas berbagai masalah tentang hakikat dan kegiatan mendidik mengajar dari zaman ke zaman atau yang membahas prinsip-prinsip dan praktik-

praktik mendidik dan mengajar dengan segala cabang-cabangnya yang telah berkembang begitu luas dan mendalam.

Dari dual hal tersebut, maka dapat penulis jelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan pada dasarnya terdapat dan berperan pada usaha-usaha yang berhubungan dengan proses mendidik dan mengajar di satu pihak, dan pada pihak lain berhubungan dengan usaha-usaha pengembangan pendidikan sebagai satu ilmu dengan segala cabang-cabangnya dan ilmu-ilmu pembantu lainnya.

Pada masa sekarang ini setiap personal atau individu sadar akan pentingnya ilmu sebagai alat atau panduan untuk memimpin umat manusia yang semakin besar jumlahnya serta kompleks persoalannya. Atas dasar kesadaran itulah dan sangat relevan dengan upaya proses pembelajaran yang mewajibkan kepada setiap umat manusia untuk mencari ilmu. Dengan demikian upaya itu tidak akan lepas dengan yang namanya pendidikan, dan tujuan pendidikan tidak akan mampu tercapai secara optimal tanpa adanya manajemen atau pengelolaan pendidikan yang baik, yang selanjutnya dalam kegiatan manajemen pendidikan diperlukan adanya pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan dan membimbing anggota dan juga dapat memberikan pengaruh, dengan kata lain para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sehingga terjalin

suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu bahwa pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan mampu untuk diwujudkan secara maksimal.

Pemimpin pada dasar dan hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakannya. Semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, maka makin besar potensi kepemimpinan yang efektif dan efisien.

Dengan menyebutkan “ kepemimpinan pendidikan”, maka disamping menjelaskan dimana kepemimpinan itu berada dan berperan, tambahan kata “pendidikan” dibelakang kata “kepemimpinan” hendaknya menampakkan pula sifat-sifat atau ciri-ciri khusus kepemimpinan yang bersifat mendidik, membimbing, dan mengemong tetapi bukan memaksa dan menekan dalam bentuk apapun.

Adapun Ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain:

1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya
 2. Menfungsikan keistimewaannya yang lebih di banding orang lain
 3. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya
 4. Mempunyai karisma atau wibawa dihadapan manusia atau orang lain
 5. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik kepadanya
 6. Bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka
 7. Mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena seorang pemimpin harus melakukan control pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan keliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencengah kemungkaran
 8. Bersedia mendengar nasehat dan tidak sombong, karena nasehat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh.
- (Mujamil Qomar. 2007)

Sebagai contoh Kepala sekolah sebagai leader/ pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah,

dan mendelegasikan tugas. Kemampuan yang harus diwujudkan seorang kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisa dari kepribadiannya, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan untuk mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi. Kepribadian kepala sekolah sebagai leader tercermin dalam sifat-sifat percaya diri, jujur, tanggungjawab, berani mengambil resiko, dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, teladan, memiliki kepribadian yang kuat, memahami semua personalnya yang memiliki kondisi yang berbeda, begitu juga kondisi siswanya berbeda dengan yang lainnya, memiliki upaya untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawannya.

Untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang pemimpin dan anggotanya seorang pemimpin setidaknya memiliki tujuh karakteristik kepemimpinan profetik yang dapat penulis uraikan pada tulisan ini, yaitu antara lain :

1. Memiliki karakter *shidiq* (jujur). Kepemimpinan profetik mengedepankan akhlak (integritas moral), selaras antara kata dan perbuatan, kejujuran, sikap dan perilaku etis. Sifat kejujuran merupakan nilai transedental yang mengacu dan mencintai kebenaran yang datangnya dari sang pencipta dan sang maha benar yaitu Allah SWT (*Shiddiq*) dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Perilaku pemimpin yang "*shiddiq*" (*shadiqun*) selalu berdasarkan pada kebenaran dari keyakinannya yang jujur dan tulus, adil, serta menghormati kebenaran yang diyakini pihak lain yang mungkin berbeda

dengan keyakinannya, bukan merasa diri atau pihaknya paling benar.

2. Memiliki karakter amanah (terpercaya). Kepemimpinan profetik menghadirkan nilai-nilai bertanggungjawab, dapat diandalkan, dipercaya, memberikan rasa aman dan jaminan kepastian, caka dan profesional dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Karakter tanggungjawab, terpercaya atau trustworthy (amanah) adalah sifat pemimpin yang senantiasa menjaga kepercayaan (trust) yang diberikan orang lain. Karakter amanah dapat menajamkan kepekaan bathin seorang pemimpin untuk bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik/organisasi.
3. Memiliki karakter tabligh (menyampaikan). Kepemimpinan profetik menggunakan keterampilan komunikasi secara efektif, memiliki wawasan, visi, inspirasi dan motivasi yang jauh ke depan. Seorang pemimpin itu memerlukan kemampuan komunikasi dan diplomasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, diamalkan, dan dialami orang lain (tabligh). Sosok pemimpin (seperti karakter nabi dan rasul) bahasanya sangat berbobot, penuh visi dan menginspirasi orang lain.
4. Memiliki karakter fathanah (cerdas). Kepemimpinan profetik itu mempunyai kecerdasan, baik intelektual, emosional maupun spiritual, kreativitas, peka terhadap kondisi yang ada dan menciptakan peluang untuk kemajuan. Sosok pemimpin itu harus cerdas, kompeten, dan profesional (fathanah).

Pemimpin yang mengacu sifat fathonah nabi adalah pemimpin pembelajar, mampu mengambil pelajaran/hikmah dari pengalaman, percaya diri, cermat, inovatif tetapi tepat azas, tepat sasaran, berkomitmen pada keunggulan, bertindak dengan motivasi tinggi, serta sadar bahwa yang dijalankan adalah untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama yang akan dicapai dengan cara-cara yang etis.

5. Memiliki karakter istiqamah (konsisten/teguh pendirian). Kepemimpinan profetik mengutamakan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Pemimpin yang istiqamah adalah pemimpin yang taat azas (peraturan), tekun, disiplin, pantang menyerah, bersungguh-sungguh, dan terbuka terhadap perubahan dan pengembangan.
6. Memiliki karakter mahabbah (cinta, kasih-sayang). Memiliki sifat mahabbah (cinta kasih sayang). Tuntunan profetik lebih mengutamakan ajaran cinta (mahabbah) dibandingkan amarah dan paksaan. Sifat pemimpin profetik selalu peduli terhadap akhlak dan kemanusiaan, mudah memahami orang lain/berempati, mau memberi tanpa pamrih (altruistik), mencintai segala ciptaan atas nama Allah dan sangat setia dicintai pengikutnya.
7. Bersikap alim/ma'ruf (baik, bijaksana, bijaksana). Kepemimpinan profetik merupakan bentuk ketaatan kepada Tuhan dan komitmen terhadap ketakwaan, kebijaksanaan dan kebajikan kepada masyarakat. Ketaatan dan ketakwaan para nabi atau rasul berpedoman pada wahyu dan mukjizat Allah.

Sifat alim/bijaksana dapat menghasilkan pesona karismatik yang diilhami oleh ketuhanan yang terpancar dari permukaan kulit, ucapan, pandangan mata, sikap, tindakan dan penampilan. Seorang pemimpin yang saleh mempunyai ciri kepribadian individu yang sempurna sehingga membuat orang lain mengerti, percaya dan patuh pada apa yang diinginkannya. Pemimpin yang saleh berarti pemimpin yang diakui sebagai pengikut karena taat kepada Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Farhan Syaddad, Agus Salim. 2009. Pengertian dan Fungsi-Fungsi Manajemen Pendidikan Islam. Makalah Program Pascasarjana Universitas Ibn Khladun Bogor
- Abdullah, Muin. 2022. Lembaga Pendidikan sebagai Suatu Sistem Sosial (Studi tentang Peran Lembaga Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). *Mamba'ul 'Ulum*, 18(1), 38-48.
- Abraham H. Maslow, 2013, *Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: PBP).
- Akyuni, Qurrata. 2018. Pengorganisasian Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Serambi Tarbawi*. Vol.10, No. 2, Juli 2018
- Alben Ambarita, 2016, *Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta:Media Akademi).
- Ali, Muhammad H. 1992. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Edisi kedua, Bandung: Sinar Baru.
- Anajih, W. (2019). MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS MADRASAH (MPMBM) di MTs Mafatihul Huda Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. *JIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 3(2). <https://doi.org/10.24235/jiem.v3i2.5991>
- Andri dan Endang. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Mediaterra

- Arcaro, Jerome S. 2005. Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asha, Lukman. 2020. Manajemen Pendidikan Madrasah: Dinamika dan Studi Perbandingan Madrasah dari Masa ke Masa. Bantul: Azyan Mitra Media.
- Astarina, M., & Asnafiyah, A. (2019). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Mutu Madrasah: Studi Program Komite Di Min 1 Bantul Yogyakarta. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.15575/isema.v4i2.6535>
- Astarina, M., & Asnafiyah, A. (2019). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Mutu Madrasah: Studi Program Komite Di Min 1 Bantul Yogyakarta. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 4(2), 181–192. <https://doi.org/10.15575/isema.v4i2.6535>
- Awwaliyah, Nurul & Rofi'ah, Siti. 2021. Madrasah sebagai Sistem Sosial: Perspektif Talcot Parsons. *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 56-71.
- Basit, Abd. & Mudlori, Moh. Imron. 2019. Analisis Problematika Tantangan Madrasah sebagai Tipologi Lembaga Pendidikan Islam dan Solusi dalam Menghadapi Era Globalisasi. *TA'LIMUNA*, 9(02), 12-23.
- Beston, Arthur. 1956. *The Restoration of Learning*. New York: Alfred A. Knopf.
- Didin Hafidudin, Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Prkatik*. Jakarta: Gema Insani

- EFA. 2015. Indonesia: Education for All 2015 National Review. Jakarta: Education for All Coordination Forum Republic Of Indonesia.
- Fatah, Nanang. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. Landasan Manajemen Pendidika. Bandung : Rosdakarya. 1996
- George R Terry. 2006. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Habe, Hazirin & Ahiruddin. 2017. Sistem Pendidikan Nasional. EKOMBIS SAINS Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis. 2(1), 39-45.
- Hadi, Abdul dan Nurhayati, 2010, Manajemen Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
- Hafidudin, Didin dkk. 2003. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta, Gema Insani Press.
- Haitami, Salim. 2012. Studi Ilmu Pendidikan Islam. Penerbit Ar-ruzz Media: Jogjakarta.
- Hamalik, Oemar. 1990, Evaluasi Kurikulum, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Hamdan, 2014. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Teori dan Praktik). Banjarmasin: UIN Antasari Press.
- Handoko. T. Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta:BPFE
- Hasan, Iye Haji, 2013, Evaluasi Implementasi kebijakan Mutu Pendidikan Pada sekolah menengah Atas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.

- Hayati, F. 2019. Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume, 3, 39-56.
- Hedwig, Rinda, 2007. *Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Monitoring Dan Evaluasi Internal*, Yogyakarta: Graha Ilmu Dzaujah, Ahmad Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar, Jakarta: Depdikbud.
- Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto. 1983. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum (sbg. Substansi Problem Administrasi Pendidikan)* Jakarta: Bina Aksara
- Husnan, Suad. 1992. *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan*, Yogyakarta: BPFE.
- Ibrahim, Mahdi bin. 1997. *Amanah dalam Manajemen*. Jakarta, Pustaka Al Kautsar.
- Indra fachrudi ,Seokarto dkk. *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*. Surabaya : Usana Offset Printing. 1983.
- Irsad Muhammad.2016*Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhaimin)*. Jakarta: Jurnal Iqra’.
- Iskandar, Abdul Malik. 2021. *Buku Ajar Sosiologi Pendidikan*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1998
- Komariah, Aan dkk, 2010, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

- Kurniady, Dedy Achmad, Linda Setiawati dan Siti Nurlatifah. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan, Jurnal Penelitian Pendidikan, V. 17, N. 3.
- Made Pidarta. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
- Mahdi bin Ibrahim. 1997. Amanah dalam Manajemen. Jakarta Pustaka Al Kautsar
- Makawimbang, Jerri H, 2003, Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
- Martoyo, Susilo. 1988. Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan. Yogyakarta. BPFE
- Muhaimin, 2005, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Muhaimin. 2010. Manajemen Pendidikan Islam, Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Rifa'i, Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik Untuk Efektivitas Pembelajaran, (Medan, Media Puspita)
- Munir, Wahyu Ilaihi. 2009. Manajemen Dakwah. Jakarta: Kencana Prenda Media Group
- Nanang Fatah, 1996. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung:Remaja Rosda Karya
- Nasution, M.N. 200Anajih, W. (2019). MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS MADRASAH (MPMBM) di MTs Mafatihul Huda

Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. *JIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 3(2).
<https://doi.org/10.24235/jiem.v3i2.5991>

Nawawi, Hadari. 1989. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Haji Masagung Hadidjah.

Nurcholiq, Mochamad. 2017. *Actuating Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*. *Jurnal EVALUASI*. Vol.1, No. 2, September

Nurhasan, 1994, *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum untuk Abad 21; Indikator Cara pengukuran dan Faktor Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Sindo.

Ovalhanif. 2009. *Strategic Planning*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES

Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pratiwi, N. A. (2019). *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Asy-Asyafiyah Kendari*. *Shautut Tarbiyah*, 25(2), 285.
<https://doi.org/10.31332/str.v25i2.1554>

Prayoga, A., Widad, A. L., Marliana, E., Mukarromah, I. S., & Ruswandi, U. (2019). *Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah*. *Muróbbî: Jurnal*

Ilmu Pendidikan, 3(1), 70–84.
<https://doi.org/10.52431/murobbi.v3i1.183>

- Qomar, M. 2008. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga. 2007
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta, Kalam Mulia.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pasal 1 ayat 1 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pasal 2 ayat 1 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Ribut Suprpto, 2017, Pengaruh Manajemen Kesiswaan Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ski Siswa Kelas VII E Mtsn Sambirejo Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017, (*Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*).
- Rifai, Muhammad, 2011. *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ruzzmedia.
- Rokhman, Fatkhur. 2020. Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam. *Intiqad : Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* Vol. 12, No. 2, Des 2020
- Sallis, Edward. 2002, *Total Quality Management in Education*, London: Stylus Publishing Inc.
- Soedijarto, 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas.

- Sondang P Siagian. 1990. Filsafah Administrasi. Jakarta: CV Masaagung
- Sri Minarti, 2011, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media).
- Sufyarman. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pendidikan Islam. Bandung, Alfabeta.
- Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Mandar Maju
- Sulistiyorini. 2006. Manajemen Pendidikan Islam. Surabaya: elKAF.
- Suryadi, Ace dan H.A.R,Tilaar, 1994. Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryo Subroto, , 2004, Manajemen Pendidikan Disekolah, (Jakarta: Rineka Cia).
- Terry, George R, 2006. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta, Bumi Aksara.
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, 1989, Admnistrasi Pendidikan, (Malang: FIP IKIP Malang).
- Ulwan, A. N. 1993. Tarbiyatu al-Aulad Fi al-Islam. Terj. Saifullah Kamalie & Hery Noer Ali: Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam. Semarang: Asy-Syifa'.
- Umami, Salsa Nafisatul., dkk. 2022. Kekhasan Pendidikan Madrasah dalam Tinjauan Filosofis. Al-Atsar, 1(2), 75-87.
- Undang-Undang RI No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang RI. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan penjelasannya.

UNESCO. 2022. Recover Together, Recover Stronger through Education.
G20 Indonesian Presidency Education Working Group.

Utomi Tri dkk.2020. Inovasi Kurikulum Dalam Dimensi Pengembangan
Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Temanggung: Journal of
Research and Thought of Islamic Education.

Wijaswanto, Wahyu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka.1999

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A

Seorang penulis, muballig dan dosen pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Lahir di Mangottong desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Sulsel, 9 Oktober 1972.

Penulis merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak H. Muchtar Maddu dan Ibu Hj. St. Maimunah. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Islam Imam Ibnu Su'ud LIPIA Jakarta jurusan Syariah, menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Muslim Indonesia bidang Dirasah Islamiyah (Pendidikan Islam) dan (S3) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bidang Dirasah Islamiyah (Tafsir).

Penulis Bagian 2:



Mujahida, S.Sos., M.Pd

Seorang pengajar di Ma'had Khadijah Ummul Mukminin Makassar dan Markaz Tahfizh Al-Qur'an dan Dirasat Islamiyah Al-Fatihah. Saat ini juga sebagai asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Lahir pada 5 Februari 1997 di desa Tosiba Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak Syahrudin dan Ibu Hadera. Ia menamatkan pendidikan

program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan program Pasca Sarjana (S2) di

Universitas Muhammadiyah Makassar prodi Manajemen Pendidikan Islam.

Penulis Bagian 3:



Farhan Rezki Arifin, S.Si, M.Si

Seorang Penulis dan Pengajar di Universitas Cokroaminoto Makassar. Lahir di Makassar, 22 April 1985. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara, dari pasangan bapak Muh. Arifin Karim dan Ros Indrawati Umar. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di dan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Hasanuddin.

Penulis Bagian 4:



Dr. Mulyana Abdullah, M.Pd.I.

Seorang Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Lahir di Garit, 9 Juli 1965. Penulis menyelesaikan pendidikan magister bidang ilmu Manajemen Pendidikan Islam di UNISBA tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan doktoral bidanh Ilmu Pendidikan Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014.

Selama berkiprah di dalam dunia pendidikan, penulis aktif menulis berbagai buku, di antaranya Mitra Bimbing: Model Pembelajaran dalam Pendidikan Inklusif; Asupan Gizi, Stunting dan Anemia, serta Diversifikasi Pangan; Panduan Manasik Haji dan Umrah; dan Perilaku Memilih Generasi Muda Indonesia.

Penulis Bagian 5:



Muhammad Yasin, Lc., M.A

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Sul-Sel. Lahir di Tile-Tile Selatan, Kab. Selayar, Sul-Sel, 30 Juni 1985. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak Jumaruddin dan Siti Amin.

Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di International University of Africa – Sudan (Faculty of Arts – Arabic Language) dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Khartoum International Institute For Arabic Language – Sudan (Faculty of Education – Curricula and Teaching Methods).

Penulis Bagian 6:



Nurhidaya M.,S.Pd.I.,M.Pd.I

Penulis adalah salah seorang dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengawali karir sebagai dosen pada 28 Juli 2016. Lahir di Datarang pada tanggal 15 September 1986, merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara pasangan dari Almarhum Muchtar Bs dan Hajrah K. Saat ini diberi amanah oleh Allah 2 orang puteri (Athiyah Tabassam Padli dan Zahratul Mujahidah Padli) hasil pernikahan

dengan suami tercinta Padli Burhan, ST.

Menamatkan Pendidikan Strata 1 di Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, lalu melanjutkan Strata 2 di Universitas yang sama konsentrasi

Manajemen Pendidikan Islam dan saat ini menempuh Pendidikan untuk Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Penulis Bagian 7:



Rosmalina Kemala, S.Kom., M.Pd

seorang Penulis dan Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Lahir di Kota Bandung Jawa Barat, 13 Agustus 1993. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah Agus Rusnandar dan Ibu Nina Mahdarini. Penulis adalah istri dari Bapak Muktashim Billah dan dikarunia 3 orang anak, yaitu Syauqi, Aisyah dan alm.Zain. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Ahmad Dahlan prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Muhammadiyah Makassar prodi Manajemen Pendidikan Islam.

Penulis Bagian 8:



Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd.I

Seorang penulis dan dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Lahir Tombolo, 23 Juli 1980. Penulis merupakan anak kedua dari delapan bersaudara dari pasangan Almarhum bapak Abd. Hamid, K dan Ibu Mulyani. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Unismuh Makassar, tahun 2005, Strata Dua (S2) Unismuh Makassar, tahun 2012, Strata Tiga (Doktor) UIN Alauddin Makassar.

Penulis Bagian 9:



Dr. Amirah S.Ag., M.Si

Penulis adalah Dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan, Lahir di Macero kec. Belawa kab. Wajo, 6 juli 1973. Penulis merupakan anak keempat dari sepuluh bersaudara dari pasangan bapak Mawardi dan ibu Munawwarah. Ia menamatkan pendidikan program sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan Tabiyah tahun 1997. Menyelesaikan proram pascasarjana (S2) di Universitas Hasanuddin Prodi Komunikasi konsentrasi komunikasi pendidikan tahun 2003, melanjutkan studi Program Doktor di Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar pada jurusan Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan tamat tahun 2019.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com